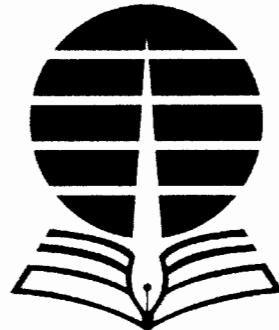


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BERAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

CIPTO HANJONO

NIM. 500894888

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Samarinda, Juni 2017

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

750177AEF174716782

6000
ENAM RIBURUPIAH



Cipto Hanjono
NIP. 500894888

ABSTRACT**THE IMPLEMENTATION OF CULTURAL WEALTH MANAGEMENT
PROGRAM AT THE CULTURE AND TOURISM AGENCY
IN BERAU REGENCY**

Cipto Hanjono
ciptoberau@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study aims to analyze the implementation process and the factors that influence the implementation of Cultural Wealth Management Program at the Culture and Tourism Agency in Berau Regency on four components of Edward III Theory: (1) Communication (2) Resources, (3) Disposition of Apparatus Attitude, and (4) Bureaucratic Structure. This research uses qualitative method with purposive sampling through interview, documentation and field observation. Data were analyzed by using data reduction, data presentation and conclusion, and verification. The result of this study indicates that the implementation process of Cultural Wealth Management Program is influenced by four components of Edward III theory as follows: the communication runs effectively, the placement of human resources have in accordance with technical provisions and their expertises, the implementation of the programs or activities have executed properly although with less or inadequate budget; the equipment resources are sufficient but need to add; authority resources have in line with their responsibilities as apparatus; disposition or apparatus attitude and bureaucratic structure is quite supportive because of their duties and responsibilities correlation. In conclusion, the implementation of the Cultural Wealth Management has been conducted properly with high budget absorptions as it is supported by factors described above. The relatively small budget availability becomes an obstacle factor to implement the program causing some activities could not be carried out and affects the target and performance achievement. It is therefore recommended to improve evaluation and revision of program objectives and targets and adjust it to the budget conditions, to maintain ongoing support factors and evaluate budgeting mechanisms in the priority and proportional scales in allocating budget to optimize program implementation.

Keywords: Policy, Program Implementation, Cultural Wealth, Tourism.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU

Cipto Hanjono
ciptoberau@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau terhadap empat komponen Teori Edward III yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi Sikap Aparatur, dan (4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan purposive sampling melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Data dianalisa dengan menggunakan reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dipengaruhi oleh empat komponen berdasarkan teori Edward III yaitu: komunikasi yang berjalan dengan baik, sumberdaya manusia yang sesuai dengan ketentuan teknis dan bidang kerjanya, pelaksanaan kegiatan yang tetap berjalan dengan baik meskipun dengan sumber daya anggaran yang sedikit, sumberdaya peralatan yang sudah memadai walaupun masih perlu ditingkatkan, sumberdaya kewenangan yang sejalan dengan tanggungjawab sebagai aparatur, disposisi atau sikap aparatur dan struktur birokrasi yang ada cukup mendukung karena terdapat korelasi dengan tugas dan tanggungjawab pelaksana implementasi program. Sebagai kesimpulan, implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah berjalan cukup baik dengan serapan anggaran yang tinggi karena didukung faktor-faktor yang mendukung sebagaimana penjelasan di atas. Ketersediaan anggaran yang relatif kecil menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi program yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga mempengaruhi sasaran dan capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Oleh karena itu disarankan agar lebih banyak melakukan evaluasi dan revisi terhadap sasaran dan target program disesuaikan dengan kondisi anggaran, mempertahankan faktor-faktor pendukung yang telah berjalan dan mengevaluasi mekanisme penganggaran yang lebih mengedepankan skala prioritas dan proporsional dalam mengalokasikan anggaran belanja untuk mengoptimalkan implementasi program.

Kata kunci: Kebijakan, Implementasi Program, Kekayaan Budaya, Pariwisata.

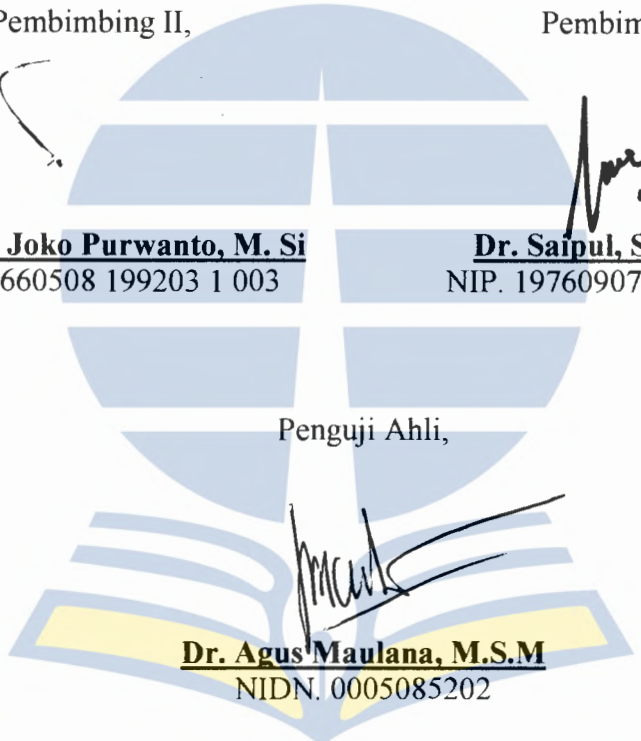
PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
Penyusun TAPM : Cipto Hanjono.
NIM : 500894888.
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik.
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 29 April 2017.

Menyetujui:

Pembimbing II,

Pembimbing I,



Dr. Agus Joko Purwanto, M. Si
NIP. 19660508 199203 1 003

Dr. Saipul, S. Sos, M. Si
NIP. 19760907 200312 1 001

Penguji Ahli,

Dr. Agus Maulana, M.S.M
NIDN. 0005085202

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Magister Administrasi Publik,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si
NIP. 19581215 1986011 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Cipto Hanjono.
NIM : 500894888.
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik.
Judul TAPM : Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

TAPM Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 29 April 2017.
Waktu : 08.00 – 09.30 Wita.

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji
Nama: Dr. Darmanto, M. Ed

.....

Penguji Ahli
Nama: Dr. Agus Maulana, M.S.M

.....

Pembimbing I
Nama: Dr. Saipul, S. Sos, M. Si

.....

Pembimbing II
Nama: Dr. Agus Joko Purwanto, M. Si

.....

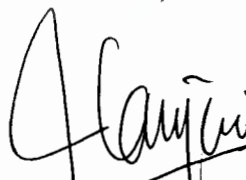
RIWAYAT HIDUP

- Nama : Cipto Hanjono.
- NIM : 500894888.
- Tempat / Tanggal Lahir : Gunung Tabur, 02 Juni 1981.
- Riwayat Pendidikan : - Lulus Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 002 Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur-Kabupaten Berau pada tahun 1993.
- Lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur-Kabupaten Berau pada tahun 1996.
- Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb-Kabupaten Berau, pada tahun 1999.
- Lulus Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kabupaten Berau pada tahun 2003.
- Riwayat Pekerjaan : - Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau pada tahun 2001-2009.
- Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (PNS/ ASN) di Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau pada tahun 2009-sampai sekarang.



Samarinda, Juni 2017

Peneliti,



Cipto Hanjono
NIM. 500894888

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, sebagai salah satu syarat meraih gelar Magister pada Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Penulisan TAPM ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Penulisan TAPM ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Berau khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam rangka melaksanakan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya di Kabupaten Berau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hingga penyelesaian TAPM ini terdapat banyak hambatan yang penulis hadapi karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan. Namun berkat bantuan, arahan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan TAPM ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulusnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Darmanto, M. Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Administrasi Program Magister Administrasi Publik.

3. Ibu Dr. Meita Istianda, S. IP, M. Si selaku Kepala UPBJJ-Universitas Terbuka Samarinda;
4. Bapak Dr. Saipul, S. Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Joko Purwanto, M. Si selaku Dosen Pembimbing II pada penelitian ini yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk arahan dan bimbingan dalam penulisan TAPM ini;
5. Ibu Prof. Dr. Endang Wirjatmi, TL. M.Si selaku Dosen Ahli pada Bimbingan TAPM Residensial 1.
6. Bapak Dr. Agus Maulana, M.S.M selaku Dosen Penguji Ahli pada Ujian Sidang TAPM;
7. Bapak H. Mappasikra Mappaselleng, SE selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang telah memberikan izin untuk penelitian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
8. Ayahanda Albuddin Noor. S dan Ibunda Hj. Fatmawati, yang telah memberikan dukungan yang penuh serta do'a restunya.
9. Masfaridhah, A. Md. Kep (Isteri), Yasmin Gheriya, Muhammad Fatih dan Muhammad Rifat (Anak) yang dengan ikhlas memberikan dukungan yang penuh, do'a restu serta perhatian yang tulus.
10. Rekan-rekan Program Magister Administrasi Publik yang selalu memberikan semangat, masukan yang berharga hingga penyusunan TAPM ini terselesaikan.

Akhir kata, saya berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan TAPM ini.

Penulis,

Cipto Hanjono
NIM. 500894888



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pernyataan	ii
Abstract	iii
Abstrak	iv
Lembar Persetujuan TAPM	v
Lembar Pengesahan.....	vi
Lembar Persetujuan Unggah Karya Ilmiah	vii
Riwayat Hidup	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan	12
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	12
2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan...	14
3. Model Implementasi Kebijakan.....	16

B. Tinjauan Tentang Program Pengelolaan Kekayaan Budaya...	24
C. Penelitian Terdahulu.....	25
D. Kerangka Berfikir.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokus Penelitian	31
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	31
D. Informan Penelitian	32
E. Instrumen Penelitian	34
F. Sumber Dan Jenis Data	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	37
G. Teknik Pengumpulan Data	38
1. Wawancara	38
2. Dokumentasi	39
3. Observasi	40
H. Teknik Analisis Data	40
1. Tahap Reduksi Data	41
2. Tahap Penyajian Data.....	41
3. Tahap Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan.....	42
I. Keabsahan Data	42
1. Standar Kredibilitas	43
2. Standar Transferabilitas	44
3. Standar Depandabilitas	44
4. Standar Konfirmabilitas	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Keadaan Geografi	46
2. Keadaan Demografi	47

B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.....	48
1. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	49
2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	50
3. Tugas Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	51
4. Kekayaan Budaya di Kabupaten Berau	52
C. Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	55
D. Hasil Penelitian Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	57
E. Hasil Penelitian Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	87
BAB I PENDAHULUAN.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Kegiatan dan Jumlah Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015.....	7
Tabel 4.1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Kegiatan Tahun 2013, 2014, 2015.....	56
Tabel 4.2	Usulan Anggaran dan Anggaran Yang Ditetapkan untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015	67
Tabel 4.3	Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2013.....	70
Tabel 4.4	Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2014.....	71
Tabel 4.5	Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2015.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 2.1	Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Menurut Edward III.....	17
Gambar 2.2	Model Kerangka Berfikir Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

- Lampiran 1 Panduan Wawancara.
- Lampiran 2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau.
- Lampiran 3 Permohonan Ijin Pengumpulan Data Penelitian dari Universitas Terbuka.
- Lampiran 4 Ijin Pengumpulan Data Penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
- Lampiran 5 Data Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dan Kegiatan Tahun 2013, 2014 Dan 2015.
- Lampiran 6 Data Usulan Anggaran Dan Anggaran Yang Ditetapkan Untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun Anggaran 2013, 2014 Dan 2015.
- Lampiran 7 Data Target Anggaran, Realisasi Anggaran Dan Interpretasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2013, 2014 Dan 2015.
- Lampiran 8 Dokumentasi (photo) Wawancara Penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman obyek wisata yang melimpah, yang tersebar di seluruh provinsi yang ada. Setiap daerah memiliki obyek wisata namun tidak setiap daerah berhasil dalam mengelola potensi wisata yang ada, sehingga terjadi kesenjangan pengembangan wisata antar daerah. Pariwisata saat merupakan sektor unggulan dan dapat diandalkan untuk meningkatnya pendapatan negara maupun daerah. Untuk itu Pemerintah Indonesia berupaya agar setiap daerah di Indonesia terus mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah masing-masing mengingat setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing.

Dalam situs resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia <http://www.kemepar.go.id/>, memberitakan bahwa Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan akselerasi dalam rangka mewujudkan pencapaian target pembangunan di masing-masing sektor. Percepatan akselerasi sektor pariwisata harus dilakukan mengingat target lima tahun ke depan (2019) besarnya dua kali lipat atau 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10 juta wisman. Dalam lima tahun ke depan atau 2019 sektor pariwisata harus dapat memberikan kontribusi pada PDB Nasional sebesar 8%, devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, target kunjungan wisatawan mancanegara

(wisman) sebanyak 20 juta wisman dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia. Sementara tahun ini target pariwisata ditetapkan ; jumlah kunjungan wisman sebesar 12 juta dengan devisa yang dihasilkan diproyeksikan sebesar Rp 172 triliun; jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 260 juta perjalanan dengan uang yang dibelanjakan sebesar Rp 223,6 triliun; kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional akan meningkat menjadi 5%; dan jumlah lapangan kerja yang diciptakan menjadi 11,7 juta tenaga kerja.

Sebagai upaya untuk mencapai target tersebut, Pemerintah melakukan terobosan regulasi dengan memperbanyak pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang saat ini mencapai 90 negara (Perpres No.104 Tahun 2015). Direncanakan tahun ini akan ditambah menjadi 174 negara. Dengan kebijakan BVK diproyeksikan tahun ini akan meningkatkan 1 juta wisman dengan devisa sebesar US\$ 1 milyar.

Dengan melihat tingkat persaingan pariwisata baik di dalam negeri maupun di dunia internasional maka tidak salah jika pariwisata dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Bagian upaya tersebut ditandai dengan amanat presiden dengan penetapan 10 destinasi prioritas, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal arahan presiden Republik Indonesia mengenai pariwisata dan arahan presiden pada sidang kabinet

awal tahun pada 4 Januari 2016. Destinasi-destinasi yang dimaksud adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Beragamnya destinasi di Indonesia juga tidak merupakan jaminan akan langsung menjadi pusat perhatian dunia apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Peranan swasta dan pemerintah merupakan faktor penentu dalam pengelolaan destinasi wisata yang meliputi banyak objek wisata yang harus dikelola dan dilindung atau dilestarikan. Di Kalimantan Timur menyimpan berbagai objek dan potensi wisata yang luar biasa terutama objek wisata alamnya yang sebagian telah dikenal baik dalam negeri hingga dunia internasional khususnya wisata bahari yang ada di Kabupaten Berau yaitu Kepulauan Derawan. Destinasi yang sangat diunggulkan Kabupaten Berau sebagai destinasi unggulan adalah Kepulauan Derawan yang memang saat ini menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang terkenal dengan wisata baharinya bahkan pada tahun 2005 Kepulauan Derawan telah dicalonkan untuk menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO karena di Kepulauan Derawan terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting yaitu terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau (hutan mangrove), dan banyak lagi spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, ikan duyung, ikan barakuda dan beberapa spesies lainnya.

Selain objek wisata kepulauan atau bahari, Kabupaten Berau merupakan daerah yang memiliki sejarah Kerajaan dan Kesultanan yang juga menghiasi

sejarah di Indonesia. Berdirinya beberapa kerajaan dan kesultanan di wilayah Kabupaten Berau merupakan pecahan dari Kerajaan Berau meninggalkan banyak sekali peninggalan sejarah, cagar budaya, nilai budaya, adat serta tradisi. Selain yang bersumber dari kerajaan yang pernah berdiri di Kabupaten Berau tersebut, adapula budaya-budaya dari suku atau masyarakat lokal seperti yang berasal dari kebudayaan Dayak dan Bajau yang meliputi Kabupaten Berau baik dari pedalaman hingga ke daerah-daerah pesisir Kabupaten Berau yang harus dikelola dengan baik. Kekayaan budaya tersebut merupakan bagian dari obyek dan daya tarik wisata dan sangat perlu untuk terus dilestarikan karena merupakan khasanah kekayaan bangsa Indonesia dan kekayaan lokal masyarakat Kabupaten Berau dan tidak akan kalah dengan jenis wisata yang lain apabila dikelola dengan apik. Disamping itu pula Kabupaten Berau juga memiliki khasanah kekayaan budaya yang beragam selain yang berasal dari kekayaan budaya lokal. Hal tersebut sebagai konsekuensi sebagai Kabupaten yang heterogenitasnya cukup tinggi. Akibat dari hal tersebut maka hasil kebudayaan dari daerah lainpun telah berjalan dengan seimbang dengan kekayaan budaya lokal.

Pengembangan dan pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu berkontribusi secara nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia

untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

Sebagai bentuk tanggungjawab yang besar terhadap kewajiban untuk melestarikan budaya atau cagar budaya di tanah air ini, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi maupun aturan yang mendasarinya baik berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Surat Keputusan Bupati diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 1 menjelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Sebagai salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Berau dalam upaya untuk melestarikan kekayaan budaya di Indonesia seperti cagar budaya, nilai budaya, adat dan tradisi di Kabupaten Berau. Beberapa peninggalan selain situs kawasan sejarah bangunan Istana Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung serta masih banyak pula warisan cagar budaya seperti benda-benda peninggalan sejarah budaya. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau hingga saat ini terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan kekayaan yang terdapat di Kabupaten Berau tersebut yang salah satunya upayanya adalah dengan mengimplementasikan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebagai bentuk pelaksanaan Urusan Wajib Kabupaten Berau (Peraturan

Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007). Ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 dan selanjutnya masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menjadi sebuah Program dan Kegiatan.

Program disusun beserta anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui mekanisme penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD yang tentu saja merupakan langkah nyata atau dan terencana untuk melaksanakan upaya mengelola kekayaan budaya di Kabupaten Berau sehingga selain dapat dilestarikan dan juga dapat bernilai jual sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Berau sehingga mendukung program pemerintah untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara untuk menikmati wisata budaya yang telah dikelola dengan baik.

Secara garis besar pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya telah memiliki landasan yang kuat berdasarkan apa yang dikemukakan di atas. Akan tetapi saat ini mungkin saja masih ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam proses implementasinya dalam upaya melestarikan kekayaan budaya di Kabupaten Berau.

Adapun tolok ukur permasalahan dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang sangat besar adalah dengan memperhatikan target yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau berdasarkan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Kegiatan dan Jumlah Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015

Program dan Kegiatan		Jumlah Anggaran (Rp)
I.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2013	1.181.723.000,-
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	450.000.000,-
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	62.628.000,-
3.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	429.700.000,-
4.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	83.635.000,-
5.	Pengelolaan dan Penambahan Koleksi Pada Museum dan Keraton	155.760.000,-
II.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2014	4.987.910.805,-
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	364.761.000,-
2.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	4.340.396.705,-
3.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	282.753.100,-
III.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2015	2.236.340.000,-
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	2.236.340.000,-
2.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	316.720.000,-
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	281.500.000,-

4.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	143.500.000,-
----	--	---------------

Sumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Dengan memperhatikan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa kegiatan dan ketersediaan anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 mengalami perbedaan jumlah kegiatan dan anggaran setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah kegiatan 5 dan total anggaran Rp. 1.181.723.000,-, dan pada tahun 2014 kegiatan menjadi 3 kegiatan tetapi total anggaran lebih besar yaitu Rp. 4.987.910.805,-, dan tahun 2015 jumlah kegiatan bertambah lagi namun total anggaran menurun menjadi Rp. 2.978.060,-. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan karena peneliti melihat bahwa demi untuk mengkondisikan salah satu atau beberapa kegiatan menjadi besar atau prioritas utama maka kegiatan yang lain menjadi tidak prioritas atau dengan kata lain dikorbankan. Hal ini terkesan adanya inkonsistensi pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dikhawatirkan akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi program tersebut. Penyebab terjadinya fluktuatifnya jumlah kegiatan dan anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya tersebut adalah keterbatasan atau naik turunnya plafon anggaran setiap tahunnya yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Berau dari sekian usulan kegiatan dan anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Usulan yang berbentuk Rencana Kerja (Renja) yang diajukan

merupakan rencana program dan kegiatan serta anggaran yang SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata butuhkan untuk program-program kerja per tahun anggaran, termasuk didalamnya usulan untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Namun apa yang diusulkan bukan merupakan wewenang pelaksana program untuk menentukan berapa jumlah kegiatan dan anggaran yang akan diakomodir, sehingga apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah harus diterima dan disiasati untuk tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hasil akhirnya adalah SKPD harus membuat prioritas atau harus mengeliminasi beberapa kegiatan yang ada dalam program karena terbatasnya plafon anggaran tersebut.

Sehubungan dengan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau?

3. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain :

1. Memberikan informasi tentang implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
2. Salah satu wujud kontribusi akademis dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

3. Memberikan bahan masukan kepada para pemangku kepentingan dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.
4. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang memerlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Prinsip dalam sebuah implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi diartikan dalam kamus Webster (dalam Wahab, 2004) dengan mengartikannya sebagai “mengimplementasikan” yang mempunyai pengertian *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Berdasarkan pandangan ini maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya

dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Selanjutnya Riant (2004), mendefinisikan implementasi kebijaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, dan untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi merupakan suatu aktivitas mengenai dampak pada sesuatu yang menjadi tujuan dari program. Menganalisis sebuah implementasi berarti berusaha memahami apa dampak dari sebuah program setelah dilaksanakan, baik peristiwa maupun kegiatan yang menjadi konsekuensi setelah proses implementasi sebuah program, baik yang mengarah pada usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun upaya untuk memberikan dampak kepada lingkungan atau masyarakat.

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti memakai sudut pandang bahwa proses implementasi dari pejabat-pejabat atau instansi pelaksana di lapangan (*the periphery*) harus dapat berinteraksi dan saling mengisi dengan masyarakat setempat. Dari sudut pandang ini, implementasi tidak hanya terfokus pada tindakan atau perilaku aparat dan instansi pelaksana di lapangan, tetapi juga upaya bersama dengan masyarakat dalam upaya menanggulangi gangguan-gangguan yang muncul di lapangan di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh pihak-pihak di luar instansi pelaksana.

2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan tidak menutup kemungkinan akan mengalami terjadinya perbedaan antara apa yang direncanakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksana kebijakan. Untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijaksanaan tersebut, berbagai pendekatan harus dilakukan. Menurut Wahab (2004) mengatakan untuk mengimplementasikan kebijakan dapat digunakan beberapa pendekatan yang menyandarkan diri pada pendekatan dari atas atau *top down* antara lain : pendekatan struktural (*structural approach*), pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*), pendekatan keperilakukaan (*behavioural approach*), dan pendekatan politik (*political approach*).

Pendekatan struktural (*structural approach*) adalah menganggap bahwa kepercayaan terhadap prinsip-prinsip universal dari organisasi yang baik kini harus diubah, yakni perhatian pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula.

Pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*) adalah pendekatan terhadap prosedur dan jaringan kerja dari implementasi kebijaksanaan. Di sini implementasi kebijaksanaan akan mengalami tahap-tahap berupa perencanaan jaringan kerja sampai dengan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memperkirakan secara tepat jangka waktu penyelesaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitor setiap peluang waktu yang ada bagi penyelesaian tugas dalam jaringan kerja.

Pendekatan keperilakuan (*behavioural approach*) adalah suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada sifat-sifat perilaku masyarakat. Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keperilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*). Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang tersedia jarang sekali yang sederhana seperti menerima dan menolak, dan sebenarnya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap, mulai penerimaan aktif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh dan penolakan pasif hingga penolakan aktif.

Pendekatan politik (*political approach*), istilah politik di sini tidak semata-mata terbatas pada partai politik. Dalam pembahasan ini pengertian politik lebih mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan di dalam lingkungan organisasi.

Pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*), kerana yang ingin peneliti dapatkan adalah informasi tentang keefektivan pelaksanaan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang tentu saja berkaitan dengan prosedur kerja dan jaringan kerja para pelaksana implementasi (*implementors*) di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

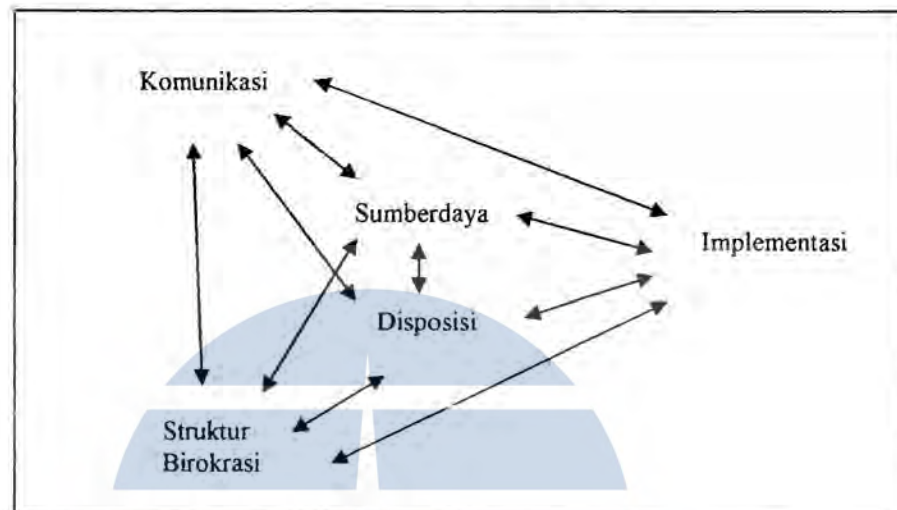
Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh untuk melaksanakan kehendaknya (Wahab, 1997).

3. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi diperlukan setiap perumus kebijakan yang menginginkan setiap kebijakannya berhasil diterapkan atau dilaksanakan. Implementasi akan berhasil bila mengikuti model tertentu dan akan lebih mungkin berhasil lagi apabila menggunakan model lebih dari satu. Berhubungan dengan model implementasi, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu : a) Analisis implementasi, bagaimana sesuatu yang kita buat atau desain implementasi bisa menghasilkan tujuan maksimal. Maka pertanyaan yang perlu dijawab adalah siapa yang terlibat di dalam implementasi (menyangkut aktor atau lembaga), bagaimana tersedianya sumber daya, dukungan kelompok, sasaran, teknologi, bagaimanakah kegiatan-kegiatan implementasi itu akan dilaksanakan dan faktor kritis apa yang bisa menyebabkan tujuan kebijaksanaan berhasil atau tidak. b) Dengan analisis, implementasi tidak dengan sendirinya akan berhasil mencapai tujuan, maka yang perlu dilihat adalah proses implementasi. Sebab gagal atau tidak suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh proses implementasi.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Gambar 2.1
Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Menurut Edward III



a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "*probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan "*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter*

accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”

2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan

memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.*

4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward III dalam Widodo (2010)

mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005), "*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi

Edward III dalam Winarno (2005) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010), mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena

kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

B. Tinjauan Tentang Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Jones dalam Suryana (2009) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya adalah program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Berau melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 dengan uraian kegiatan didalamnya adalah: Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, Pengembangan kebudayaan dan pariwisata, Pengembangan nilai dan geografi sejarah, Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka, Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala, Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya, Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah, Pengelolaan karya cetak dan karya rekam, Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul Analisis Program Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Selat Baru Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Syafrizal, 2012). Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis serta di desa selat baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pengembangan objek wisata

pantai selat baru serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan program pengembangan objek wisata pantai selat baru. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana data deskriptif jawaban responden dan di analisa oleh penulis. Kesimpulan penelitian bahwa pelaksanaan program pengembangan objek wisata pantai selat baru masih dalam kategori kurang baik. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan program objek wisata pantai selat baru adalah kurangnya perhatian dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan serta kurangnya partisipasi masyarakat sekitar Pantai Selatbaru dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap kinerja Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program-programnya.

D. Kerangka Berfikir

Sekarang dalam Sugiono (2009) mengemukakan Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir harus menjelaskan pertautan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Untuk

penelitian kualitatif kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis.

Sebuah kebijakan tidak akan pernah memberikan makna apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Karena implementasi merupakan proses nyata dari sebuah kebijakan. Demikian halnya dengan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang merupakan salah satu bagian program pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam memperoleh data, peneliti melakukan observasi langsung melakukan pengamatan terhadap implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dan melakukan wawancara dengan melibatkan informan kunci aparatur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang terkait secara kedinasan dengan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

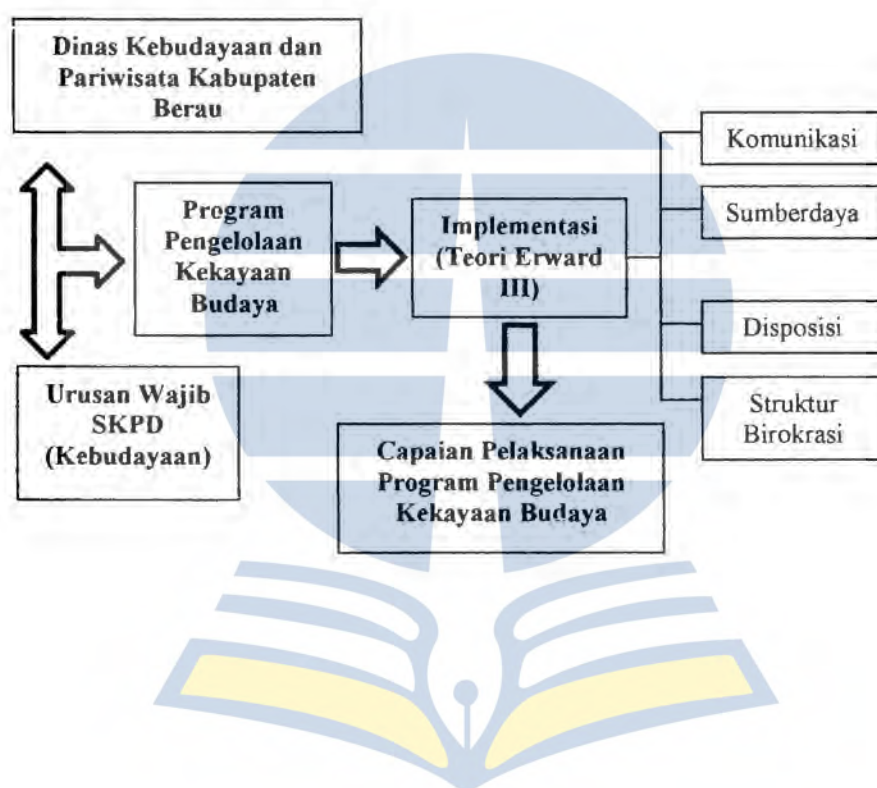
Untuk analisa data langkah yang diambil adalah mereduksi data dengan membuat ringkasan, menelusur tema dan menganalisis data-data yang telah terorganisir dalam bentuk variabel-variabel yang diteliti sehingga terlihat gambaran yang lebih utuh. Kemudian langkah akhir adalah menginterpretasikan hasil yang diperoleh secara deskriptif dan sistematis sehingga diperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan.

Model Implementasi Kebijakan Edward III yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Model Edward III tersebut menjelaskan terdapat empat variabel/ faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi. Empat variabel Model Edward III yang akan digunakan peneliti adalah : Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*resources*), Disposisi dan Sikap (*Dispositions*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Hasil penelitian ini berupa laporan deskriptif tentang implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berat dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Model Kerangka Berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Kerangka Berpikir Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Artinya, pembahasan dari data yang dikumpulkan akan menghasilkan atau menyimpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti serta dokumen lain yang mendukung tersebut dibahas dan menghasilkan narasi deskriptif. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Kudaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong (2014) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan induktif, dan hasil kesimpulan penelitian lebih menekankan pada generalisasi yaitu data disusun mulai dari pengumpulan data/ fakta dan berakhir pada simpulan yang merupakan ciri umum dari data/ fakta yang diamati. Langkah dalam pendekatan induktif ini adalah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder yang

kemudian berakhir pada satu kesimpulan umum terhadap fenomena hasil penelitian.

Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong (2014) adalah 1). Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 2). Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, 3). Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dalam penelitian ini peneliti mencari fakta tentang bagaimana implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan interpretasi yang tepat, serta akan mempelajari masalah yang terjadi di lapangan, termasuk didalamnya adalah kegiatan, pandangan, sikap, serta proses yang berlangsung dalam program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

B. Lokus Penelitian

Lokus penelitian yang dipilih sesuai dengan tema dan permasalahan penelitian adalah di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus Penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membatasi studi sehingga tidak terjadi salah paham dalam menafsirkan komponen

yang diteliti. Dengan adanya fokus penelitian seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2014). Dengan menetapkan fokus penelitian akan diperoleh dua hal sebagai berikut: 1). Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak, 2). Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang mengalir. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak akan digunakan.

Berdasarkan tema penelitian dan masalah yang dikemukakan, maka fokus penelitian ini adalah implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program tersebut. Sedangkan sub fokus penelitiannya adalah sejauh mana pengaruh komponen-komponen yang digunakan untuk menganalisis proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya antara lain Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (sikap aparatur) dan Struktur Birokrasi.

D. Informan Penelitian

Untuk keakuratan dan validitas penelitian, maka pemilihan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan jumlah informan sangat tergantung dan dikehendaki oleh peneliti. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Informan yang dipilih tersebut adalah karena mereka mewakili unsur yang

berhubungan dengan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Informasi yang dapat digali dari informan tersebut sebagaimana teori yang digunakan yaitu berdasarkan Teori Edward III adalah bagaimana Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (sikap aparatur) dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Adapun informan kunci yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau (1 Orang).
2. Kepala Bidang Kebudayaan (1 Orang).
3. Kepala Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Tradisi (1 Orang).
4. Kepala Seksi Permuseuman dan Pengelolaan BCB (1 Orang).
5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program (1 Orang).
6. Kepala Sub Bagian Keuangan (1 Orang).

Dengan melakukan wawancara terhadap informan tersebut, peneliti mendapatkan informasi atau data tentang implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dengan tingkat keabsahan data yang tinggi karena informan memiliki peran strategis. Dari informan tersebut juga diharapkan dapat memberikan arahan-arahan untuk mengembangkan penelitian secara lebih mendalam.

E. Instrumen Penelitian

Di dalam sebuah penelitian dibutuhkan instrumen untuk mendapatkan data yang valid (Moleong, 2014). Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data di lapangan. Dengan perannya sebagai pengumpul data penelitian, maka peneliti sebagai instrumen melakukan “Validasi” terkait kesiapan melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan penelitian.

Validasi terhadap peneliti sebagai instrument penelitian meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif dan penguasaan mengenai obyek yang diteliti, yaitu bagaimanakah hasil serta dampak implementasi program tersebut. Sedangkan berbagai bentuk alat-alat bantu seperti dokumentasi kegiatan, dokumentasi fisik serta dokumen-dokumen pendukung yang akan didapat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau akan digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian.

Berikut kerangka panduan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Komunikasi

- (1) Pertanyaan : Apakah selalu dilaksanakan rapat dan pengarahan sebelum pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya?
- (2) Pertanyaan : Apakah ada koordinasi antar bidang

dalam melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya?

b. Sumberdaya

(1) Pertanyaan : Apakah pejabat dan staf pengelola yang ditetapkan telah sesuai dengan 35 kriteria dan kemampuan?

(2) Pertanyaan : Apakah anggaran yang tersedia memberikan dampak terhadap pelaksanaan program?

(3) Pertanyaan : Apakah anggaran yang ada terealisasi dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan implementasi program?

(4) Pertanyaan : Apakah sarana atau peralatan yang ada mampu menunjang pelaksanaan program dan kegiatan?

(5) Pertanyaan : Apakah pengelolaan program yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan program dan kegiatan?

c. Disposisi/ Sikap Aparatur

(1) Pertanyaan : Apakah pelaksanaan dan realisasi program mendapatkan evaluasi secara

berkala oleh Kepala Dinas selaku pimpinan SKPD?

d. Struktur Organisasi

(1) Pertanyaan : Apakah komposisi pejabat penanggung jawab program, pejabat pelaksana teknis dan staf pengelola keuangan telah sesuai dengan struktur SKPD?

(2) Pertanyaan : Apakah struktur yang ada membuat rentang kendali menjadi jauh, sehingga pengawasan semakin lemah?

Kerangka panduan wawancara dilaksanakan sebagaimana lokus penelitian yaitu di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realita data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Dalam penelitian ini peneliti menyampaikan panduan wawancara yang kepada seluruh informan dan mendapatkan persetujuan oleh seluruh informan untuk menjawab seluruh pertanyaan wawancara dan kemudian hasil berupa transkrip wawancara

ditandatangani oleh seluruh informan sebagai bukti sah dan valid bahwa hasil wawancara telah dibuktikan dan valid oleh informan.

F. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (Moleong, 2014). Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang bagaimana implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Data primer tersebut diperoleh dengan cara peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci untuk menggali keterangan mengenai keterlibatan/ kinerja, persepsi informan dalam implementasi program pengelolaan kekayaan budaya. Data primer yang didapatkan berupa kata-kata atau percakapan yang berisi penjelasan secara khusus berdasarkan variabel penelitian melalui metode wawancara terhadap seluruh informan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi

pemerintah (Moleong, 2014). Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari arsip atau dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang berhubungan dengan variabel penelitian seperti dokumen kegiatan-kegiatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, struktur organisasi dan tupoksi pelaksana program serta catatan mengenai sarana dan peralatan kerja. Data sekunder diperoleh dengan cara observasi, pencatatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2014). Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana upaya dan kegiatan dalam program pengelolaan kekayaan budaya. Mengingat bentuk penelitian ini adalah kualitatif, maka peneliti adalah instrument utama penelitian. Menurut Lofland dalam Moleong (2014) sumber utama dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama dalam data primer. Sesuai dengan masalah dalam penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Sumber data utama yang diperlukan dalam penelitian ini berhubungan dengan bagaimana implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang bersumber dari hasil wawancara mendalam antara penulis dan informan kunci. Pengumpulan data utama atau primer dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan kunci dan informan tambahan yang dilakukan oleh peneliti mulai tanggal 5 Januari 2017 hingga 16 Januari 2017, bertempat di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data tambahan yaitu dokumen-dokumen lain atau disebut data sekunder. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa arsip surat, dokumen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan permasalahan penelitian. Melalui studi dokumentasi diharapkan peneliti mendapatkan data sekunder sebagai bahan pendukung untuk menguji keabsahan data.

3. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Sutrisno, 2000). Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana implementasi Program Pengelolaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perkembangan atau perubahan yang terjadi, dan sebagainya tentang bagaimana implementasi Program Pengelolaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau tersebut.

Dalam observasi ini peneliti mencari dan mengamati beberapa hal antara lain sarana atau peralatan yang digunakan oleh para pelaksana Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Observasi dilakukan oleh peneliti diantara atau bersamaan dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi pada bulan Januari 2017.

H. Teknik Analisis Data

Manurut Patton (Moleong, 2014), teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatandan dokumentasi sehingga mudah dipahami dan temuan dalam hasil penelitian dapat didiskripsikan dengan menggunakan tahapan analisis data model interaktif (*Interactive Model Analysis*). Miles dan Huberman dalam Bungin (2012) mengemukakan kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

1. Tahap Reduksi Data

Setelah peneliti mendapatkan data berupa catatan lapangan, lalu peneliti memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian peneliti menelaah dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh mengenai implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dan selanjutnya dihimpun dan dipilah sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

2. Tahap Penyajian Data

Hasil dari reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk uraian per variabel penelitian sehingga terlihat gambarannya secara utuh. Data kemudian disajikan dengan cara menyampaikan informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif sehingga mudah untuk

dipahami. Pada tahap ini peneliti juga membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu implementasi Program Pengelolaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dapat dipahami dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil melakukan pencarian data pendukung atau yang data yang menolak simpulan tersebut. Pada tahap ini pula peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding. Peneliti melakukan pengujian ini dengan maksud untuk memperkuat jawaban yang diajukan dan kebenaran hasil analisis yang akan menghasilkan kesimpulan yang dapat diyakini.

I. Keabsahan Data

Melakukan pemeriksaan keabsahan data adalah sebuah jalan agar penelitian nantinya dapat benar-benar dipertanggung jawabkan. Guna memenuhi hal tersebut, dalam penelitian kualitatif diberikan beberapa teknik. Teknik keabsahan data yang menjadi acuan pada penelitian ini adalah teknik menurut teori Lincoln dan Guba dalam Bungin (2012) ada empat standar atau kriteria utama dalam menjamin keabsahan penelitian kualitatif yaitu : standar kredibilitas (validitas internal), standar transferabilitas (validitas eksternal),

standar depandabilitas (reabilitas) dan standar konfirmabilitas (audit/pemeriksaan).

1. Standar Kredibilitas

Standar kredibilitas ini identik dengan validitas internal dalam penelitian kualitatif. Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan (informasi yang digali dari informan yang diteliti) perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a). memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan dan melakukan observasi secara terus menerus dan bersungguh-sungguh sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya; teknik observasi tersebut boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyak fenomena sosial yang tersesamar atau kasat mata yang sulit terungkap bilamana hanya melakukan wawancara. b). Melakukan trigulasi, baik trigulasi metode (menggunakan lintas metode pengumpulan data), tigulasi sumber data (memilih sumber data yang sesuai) dan trigulasi pengumpul data (beberapa peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). Dengan teknik trigulasi ini memungkinkan diperoleh variasi informasi seluas-luasnya dan selengkap- lengkapnya; c). Melibatkan teman sejawat untuk melakukan diskusi memberikan masukan, bahkan kritikan mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian; d). Melakukan analisis atau kajian kasus negatif, dalam beberapa hal kajian kasus negatif akan lebih mempertajam temuan penelitian, e). Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data; dan f).

Mengecek bersama-sama teman sejawat yang yang diajak diskusi tersebut, baik tentang data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran dan hasil kesimpulan.

2. Standar Transferabilitas

Standar ini merupakan modifikasi validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Pada prinsipnya standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dijawab oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi bilamana pembaca laporan penelitian tersebut memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan hasil penelitian.

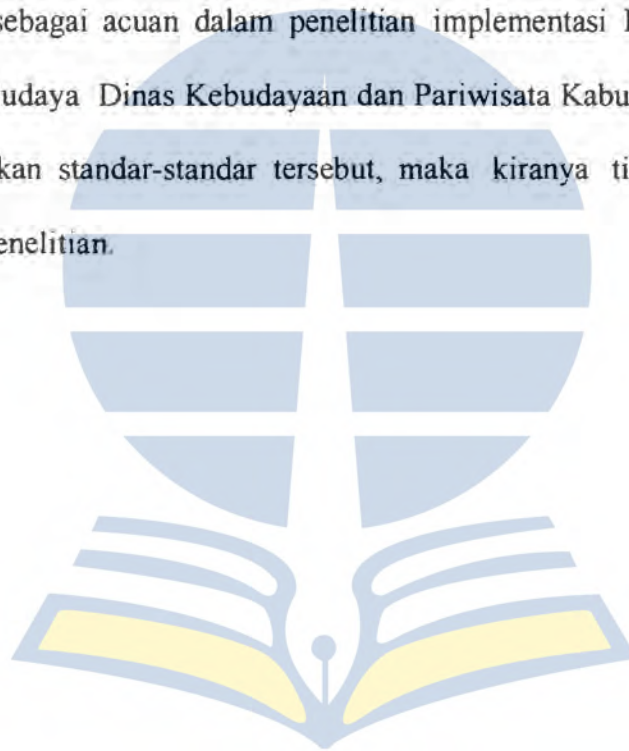
3. Standar Depandabilitas

Standar depandabilitas ini boleh dikatakan mirip dengan standar reabilitas. Adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam mengonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari kemantapan dan ketepatan menurut standar reabilitas penelitian. Makin konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian akan semakin memenuhi standar depandabilitas. Salah satu upaya untuk menilai standar depandabilitas adalah dengan melakukan audit (pemeriksaan) depandabilitas itu sendiri. Ini dapat dilakukan oleh auditor yang independen dengan melakukan reviuw terhadap seluru hasil penelitian.

4. Standar Konfirmabilitas

Standar konfirmabilitas ini lebih berfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil penelitian. Apa benar berasal dari pengumpulan data lapangan. Audit konfirmabilitas ini biasanya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas.

Standar-standar pemeriksaan keabsahan data tersebut diatas yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Dengan memperhatikan standar-standar tersebut, maka kiranya tidak diragukan lagi eksistensi penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Tanjung Redeb. Kabupaten Berau memiliki luas sekitar 34.127,47 km², yang terdiri dari daratan seluas 22.030,81 km² dan luas perairan seluas 12.299,88 km², serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 96 kampung. Luas wilayah Kabupaten Berau mencakup 13,92% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dengan prosentase luas perairan mencapai 28,74%.

Kabupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 10 LU – 2033 LS dan 1160 BT – 1190 BT dengan ketinggian di atas permukaan laut 5 – 55 m. Batangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 – 500 m (37,1%), kemudian 23,2% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26 – 100 m, sisanya terbagi sebagai daerah denganselang ketinggian 8 – 25m (7,3%) dan 0 – 7m (12,2%).

Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wialayah dan 13 (tiga belas) kecamatan, yaitu :

1. Wilayah Pesisir yang meliputi; Kecamatan Biduk-Biduk, Kecamatan Talisayan, Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua.

2. Wilayah Pedalaman yang meliputi; Kecamatan Segah, Kecamatan Kelay, Kecamatan Tubaan, Kecamatan Biatan dan Kecamatan Batu Putih.
3. Wilayah Kota yang meliputi; Kecamatan Tanjung Redeb sebagai ibukota Kabupaten Berau, Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung, dan Kecamatan Teluk Bayur.

2. Keadaan Demografi

Perkembangan penduduk merupakan salah satu dari karakteristik demografi yaitu dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Berau mencapai 218.124 jiwa yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,80% jika dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya yang sebesar 210.135 jiwa. Kecamatan Tanjung Redeb merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, dimana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Tanjung Redeb merupakan ibukota dari Kabupaten Berau dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian tentunya berada di kecamatan ini.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau tergolong cukup fluktuatif naik turun selama 13 tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk terkecil berada pada kisaran 1,06 persen yang terjadi pada tahun 2012 dan paling tinggi sebesar 7,51 persen yang terjadi pada tahun 2005. Selama periode 2006 sampai dengan 2015, pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau berkisar di bawah angka 5 persen, terkecuali pada tahun 2011 yang mencapai 7,11 persen. Pada tahun 2015 sendiri, pertumbuhan penduduk menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3,80 persen dimana tahun sebelumnya mencapai 4,25 persen.

Karakteristik jenis kelamin penduduk Kabupaten Berau dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki diantara seratus penduduk perempuan. Jika dilihat perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, Kabupaten Berau memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hal tersebut juga terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Berau dimana angka rasio jenis kelamin mencapai lebih dari 100.

Rasio jenis kelamin Kabupaten Berau pada tahun 2015 adalah sebesar 113,48 yang berarti terdapat 113-114 orang laki-laki diantara 100 orang perempuan. Kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terbesar adalah kecamatan Segah yang mencapai 127,32, sedangkan Kecamatan Biduk- Biduk memiliki jumlah rasio jenis kelamin yang relatif paling kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu sebesar 105,20.

B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Definisi dari kamus besar bahasa Indonesia, dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Sebagaimana yang dimaksud dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna maka dengan

Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Badan di Kabupaten Berau terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

a. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau, maka disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan UPTD;

- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

a. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Masih Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau maka Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Tradisional;
 - 2) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 3) Seksi Permuseuman dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya;
- d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi:
 - 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2) Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata;
 - 3) Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Kepariwisata;

e. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, membawahi:

- 1) Seksi Informasi dan Analisa Pasar;
- 2) Seksi Pemasaran Pariwisata ;
- 3) Seksi Promosi dan Penyuluhan Pariwisata;

f. UPTD

3. Tugas Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2009 dan memperhatikan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, maka tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan. Secara umum Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kebudayaan yang meliputi pengembangan seni dan nilai tradisional, sejarah dan kepurbakalaan serta permuseuman dan pengelolaan benda cagar budaya yang salah satu programnya adalah program pengelolaan kekayaan budaya. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tugas-tugas pada Jabatan Struktural pada Bidang Kebudayaan, antara lain :

- a. Kepala Bidang Kebudayaan mengepalai Bidang Kebudayaan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

- b. Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Tradisional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kebudayaan di bidang pengembangan seni dan nilai tradisional.
- c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kebudayaan di bidang sejarah dan keurbakalaan.
- d. Seksi Permuseuman dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Kebudayaan di bidang permuseuman dan pengelolaan benda cagar budaya.

4. Kekayaan Budaya di Kabupaten Berau

Ruang lingkup kekayaan budaya di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40, dimana telah ditetapkan ruang lingkup dalam pelestarian kebudayaan yang diatur dalam Pasal 7 yang meliputi aspek kesenian, keurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan dan perfilman. Dengan diperjelasnya ruang lingkup tersebut semakin memperkuat dan lebih memberikan kejelasan bagi Pemerintah untuk mampu memelihara aspek-aspek tersebut dan kemudian dikelola dengan baik untuk kemudian dikembangkan.

Pelestarian cagar budaya, nilai budaya serta adat dan tradisi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Hal tersebut

ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Kebudayaan termasuk dalam Urusan Wajib Kabupaten/ Kota. Urusan yang diemban oleh Kabupaten/ Kota khususnya Kabupaten Berau dilatarbelakangi oleh instrumen nasional Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah daerah diberikan kewajiban untuk melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah. Pada Pasal 6 ayat (1) lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa pelestarian kebudayaan di kabupaten/ kota dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan, dan dalam hal ini tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau merupakan SKPD yang diberikan tanggung jawab untuk mengemban tugas tersebut.

Beberapa regulasi dan aturan tersebut di atas menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Berau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dalam melaksanakan program yang salah satu tujuannya adalah melestarikan kekayaan budaya di Kabupaten Berau. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya adalah merupakan bagian dari Urusan Wajib Pemerintah Daerah di Indonesia, dan termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Berau sebagaimana dijelaskan di atas. Pengelolaan Kekayaan Budaya merupakan hal harus diperhatikan mengingat kekayaan budaya juga merupakan asset kekayaan daerah yang dapat berupa cagar budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya adalah sesuatu

yang harus dikelola dengan baik agar dapat dipertahankan dan dijadikan sebuah daya tarik wisata.

Kekayaan budaya di Kabupaten Berau sangat beragam berdasarkan jumlah pada jenis dan karakteristiknya baik yang bersifat kebendaan maupun nilai-nilai tradisi yang harus dikelola dengan baik serta dilestarikan dan tentunya agar dapat dijadikan penunjang pariwisata di Kabupaten Berau. Kekayaan budaya di Kabupaten Berau merupakan warisan masyarakat Kabupaten Berau pada masa terdahulu ditetapkan dan dikemas sebagai benda cagar budaya, kampung cagar budaya, maupun kawasan cagar budaya dan atraksi-atraksi budaya seperti atraksi adat dan tradisi, seni tradisi, pakaian tradisi dan lain sebagainya yang kesemuanya mengandung unsur nilai, norma budaya dan kearifan lokal masyarakat daerah Kabupaten Berau.

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas pengelolaan kekayaan budaya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang **Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, yang menegaskan bahwa urusan kebudayaan dan pariwisata melahirkan sebuah kewenangan pemerintahan daerah yang diuraikan dalam tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan sehingga mendasari berdirinya instansi teknis yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Secara teknis untuk pelaksanaan urusan kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau diatur

dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi ketentuan uraian program dan kegiatan yang dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada instansi teknis termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Salah satu program yang secara teknis adalah bentuk pelaksanaan urusan kebudayaan tersebut adalah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya merupakan salah satu program dalam Urusan Kebudayaan yang telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2010-2015. Adapun pelaksanaan anggaran program tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang anggaran pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Berau sehingga anggaran masuk dalam batang tubuh APBD Kabupaten Berau.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya akan menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD yang dijadikan target capaian kinerja dalam pengelolaan kekayaan budaya di Kabupaten Berau.

C. Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Untuk mewujudkan kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan budaya di Kabupaten Berau maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Berau selaku lembaga teknis daerah yang salah satu tugas pokoknya adalah untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dalam bidang kebudayaan menyusun sebuah program yang dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2010-2015. Sedangkan pelaksanaan anggaran pelaksanaan program ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga tersusun sebuah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lebih jauh Program Pengelolaan Budaya tersebut diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memiliki sasaran serta capaian kearah terlaksananya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Beberapa kegiatan yang dimaksud antara lain :

Tabel 4.1
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Kegiatan Tahun 2013, 2014 dan 2015

No.	Program	Tahun Anggaran	Kegiatan
1	2	3	4
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air 3. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 4. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah 5. Pengelolaan dan Penambahan Koleksi Pada Museum dan Keraton

II	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 3. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah
III	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air 3. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 4. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

Sumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut maka Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dapat diimplementasikan dalam tindakan yang realistis dan berdasarkan uraian Program dan Kegiatan yang ada dalam DPA-SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut.

D. Hasil Penelitian Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel yang sangat menentukan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu implementasi kebijakan, implementasi

kebijakan yang dituangkan dalam sebuah program akan berjalan efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus bersifat akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksananya. Komunikasi dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau merupakan tolok ukur seberapa jauh maksud dan tujuan program tersebut disampaikan secara jelas dengan sebuah interpretasi yang sama dan dikerjakan dengan secara konsisten, akurat oleh aparatur pelaksana program tersebut.

Komunikasi dilakukan dalam lingkup aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebelum ataupun dalam proses implementasi selaku lembaga teknis berupa rapat internal antara Kepala Dinas, Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang, dan khususnya Kepala Bidang Kebudayaan beserta jajarannya mengenai target, evaluasi, capaian program, realisasi dan seluruh teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Rapat teknis tersebut dimaksudkan agar seluruh aparatur yang terlibat atau yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola program tersebut mengetahui dan memahami pemberlakuan, maksud dan tujuan serta sasaran implementasi dan petunjuk pelaksanaan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya tentang bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sehingga tercapai persepsi yang sama.

Menurut penjelasan dari hasil wawancara dengan Informan 1, diungkapkan bahwa:

...”Sebelum pelaksanaan program termasuk program pengelolaan kekayaan budaya kami selaku kesekretariatan sebagai koodinator bidang akan melaksanakan rapat serta pengarahan agar capaian program dapat dipahami”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan lain yang senada juga kami dapatkan dari Informan 2 yang mengungkapkan bahwa :

...”Selalu diadakan rapat kemudian disampaikan lebih detil permasalahan program dan kegiatan sekaligus pembagian tugas-tugas”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Tanggapan Informan 1 tersebut sejalan dengan keterangan yang kami dapatkan dari Informan 3 bahwa :

...”Bentuk Komunikasi antara Kepala Dinas atau Sekretaris, akan mengadakan rapat serta pengarahan terhadap apa saja dan bagaimana melaksanakan program serta sekaligus membahas kesiapan pejadwalan waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program pengelolaan kekayaan budaya. Rapat ini umumnya diikuti oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi yang terkait dengan programnya serta staf pengelola administrasi kegiatan dan keuangannya”.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Informan 4 salah satu yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis juga memberikan pernyataan yang senada bahwa :

...”Implementasi program dan kegiatan akan selalu diawali dengan rapat pengarahan oleh Kepala SKPD atau Sekretaris serta pembahasan usulan pengelola program yaitu PPK, PPTK, dan staf bendahara atau staf administrasi”.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Informan 6 sebagai salah bagian yang banyak berhubungan langsung dengan pelaksanaan program memberikan informasi bahwa :

...”Selalu dilaksanakan rapat disetiap awal tahun anggaran, mengingat pelaksanaan program dan kegiatannya perlu untuk dikoordinasikan dan pengarahannya terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Termasuk terhadap kami pada bagian keuangan karena termasuk bagian yang banyak berkaitan langsung dengan program dan kegiatan”.
(Wawancara hari Senin, 16 Januari 2017).

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, jika akan diimplementasikan sebagaimana mestinya maka pelaksanaannya harus memahami petunjuk pelaksanaannya dan juga harus mengerti target serta capaian programnya, tanggung jawab masing-masing serta harus membuat agenda atau penjadwalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

Hasil wawancara dengan Informan 5, selaku yang melaksanakan tugas dalam menyusun perencanaan program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau bahwa :

...“Berdasarkan arahan kepala SKPD bahwa sebagai pelaksana program atau siapa saja yang ditetapkan sebagai pelaksana program baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengelola Administrasi atau Keuangan Program harus memahami tugas, tanggung jawab, teknis pelaksanaan program serta target maupun sasaran kegiatan sehingga akan membantu dalam suksesnya pelaksanaan program. Dengan demikian maka setiap awal pelaksanaan program akan dilakukan rapat yang menjelaskan itu semua”.
(Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Sebelum pelaksanaan program-program tidak cukup hanya dilakukan rapat dan pengarahannya akan tetapi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau juga seluruh Bidang yang ada diharuskan untuk saling berkoordinasi untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan agar dengan begitu maka antara Program Pengelolaan Kekayaan Budaya juga mendapatkan dukungan

dari seluruh komponen SKPD. Maksud dan tujuan dilakukan koordinasi ini adalah agar kegiatan dalam program pengelolaan kekayaan budaya diharapkan dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pada Bidang dan Program yang lain sehingga hasilnya lebih maksimal.

Koordinasi sangat diperlukan dalam melaksanakan program n, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 1 bahwa :

...”Berdasarkan arahan Kepala Dinas melalui kesekretariatan disampaikan agar bidang yang melaksanakan program tersebut berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan yang lebih mendalam mengenai hal yang sama diberikan oleh Informan 2 bahwa :

...”Kaitannya tidak mungkin masing-masing berdiri sendiri karena sebagai suatu lembaga kita harus saling koordinasi kegiatan, apa saja yang ada disini terutama berkaitan dengan program pengelolaan kekayaan budaya yang ada kaitannya dengan program dan kegiatan di bidang-bidang yang lain”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Komunikasi baik berupa rapat maupun koordinasi antar bidang yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau akan membawa dampak yang baik dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara diketahui bahwa rapat dan koordinasi yang dilakukan sebagai bentuk komunikasi dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau adalah adalah semacam langkah awal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mensosialisasikan target dan indikator program dan kegiatan agar dipahami

oleh pengelola program yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas agar sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Dalam rapat terjadi interaksi antara pimpinan SKPD dengan Bidang Kebudayaan dalam upaya menyatukan pemahaman terhadap teknis implementasi program dan terjadi pula koordinasi antara Bidang Kebudayaan dengan Bidang-Bidang yang lain khususnya Bidang Pemasaran Pariwisata sehingga hasil kegiatan tidak hanya sebatas dilaksanakan akan tetapi dapat didukung oleh promosi pariwisata yang menjadi tugas Bidang Pemasaran Pariwisata.

Komunikasi yang efektif akan memberikan dampak pada pencapaian target dan sasaran yang tepat, dan pentingnya komunikasi agar sebuah kebijakan atau program dapat berjalan dengan konsep yang benar karena dalam sebuah komunikasi terdapat yang namanya transformasi informasi (*transmission*), sebagaimana yang dijelaskan oleh Edward III dalam Winarno (2005) adalah faktor utama yang mempengaruhi komunikasi. implementasi memerlukan proses transformasi informasi, sebelum implementator menetapkan suatu keputusan, maka ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kedua, kejelasan informasi (*clarity*), petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Karena ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah dan bahkan mungkin akan menyebabkan tidak tercapainya

target dan sasaran program tersebut. Yang ketiga adalah konsistensi informasi (*consistency*), diperlukan agar kebijakan atau arahan yang diberikan kepada para implementor Program Pengelolaan Kekayaan Budaya tidak simpang siur dan membingungkan, baik mengenai target tujuan dan capaian yang harus dipahami. Berdasarkan uraian dan analisis tersebut maka kondisi tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III mengenai faktor komunikasi yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan. Komunikasi dalam proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah berjalan secara efektif karena berdasarkan pada penjelasan yang dikemukakan oleh informan bahwa proses komunikasi mempermudah pemahaman tugas, tanggung jawab serta mekanisme pelaksanaan program. Dari proses komunikasi pula terjadi saling koordinasi diantara pelaksana program sejalan dengan penjelasan Edward III di atas mengenai transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi dan hal ini tentunya berpengaruh kepada daya serap anggaran, karena dengan komunikasi untuk saling memberikan informasi berjalan dengan baik maka anggaran program yang terealisasi sesuai ketentuan teknis walaupun masih ada yang di bawah 100% akan tetapi secara keseluruhan program dan kegiatan berjalan dan terselesaikan dengan baik.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan hal yang punya peranan penting dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Berau. Perintah maupun arahan baik dari Kepala Dinas, Kepala Bidang baik yang berasal bahan acuan program yaitu Rencana Strategis (Renstra) maupun teknis pelaksanaan kegiatan yang berbentuk pedoman pelaksanaan anggaran telah diteruskan dan ditransformasi secara jelas dan konsisten, tetapi jika pada tataran pelaksana program atau kebijakan masih terdapat kekurangan sumber daya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan maka tentu saja program akan berjalan kurang efektif. Implementasi program Pengelolaan Kekayaan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dirasakan masih memiliki kekurangan pada dukungan sumber dayanya, yaitu :

a. Sumberdaya Manusia

Menurut hasil wawancara dengan Informan 2 yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, didapatkan informasi bahwa :

...”Sebelum mengusulkan ke bagian sekretariat pejabat dalam hal ini PPK, PPTK, staf pengelola atau bendahara program kami pilih berdasarkan jabatan struktural yang ada hubungan tupoksinya serta kecakapan dan pengalaman menangani program tersebut”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Informan 3 yang mengungkapkan bahwa :

... “Kami selaku Kepala Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Tradisi ditunjuk oleh Kepala Bidang Kebudayaan untuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis alasannya adalah terkait dengan tupoksi dan penilaian kinerja sehingga memang telah sesuai dengan kaedah yang berlaku dan kebijakan kepala dinas. Begitu pula staf bendahara yang membuat pertanggungjawaban keuangan telah dianggap cakap dan mampu “.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Informasi yang diberikan Informan 3 tersebut dibenarkan oleh Informan 1 selaku pejabat yang menyusun draf Surat Keputusan (SK) pengelola program menyatakan bahwa :

...”Pejabat dan staf pengelola program adalah usulan dari bidang masing-masing yang menangani program tersebut dan dipandang cakap dalam membantu penanggung jawab kegiatan dalam hal ini Kepala Bidang dalam melaksanakan Program Kekayaan Budaya”.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Untuk memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pengelola program dan kegiatan maka personil yang diajukan memiliki relevansi dengan tugas dan fungsinya sebagai pejabat struktural. Kepala Bidang Kebudayaan adalah pejabat struktural tertinggi pada Bidang Kebudayaan maka akan ditunjuk dalam Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi strukturalnya dengan program tersebut akan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta Staf yang dibawahinya yang tentu saja dalam menjalankan tugas kedinasan dalam lingkup Bidang Kebudayaan dapat ditunjuk sebagai staf pengelola administrasi atau bendahara yang tentu saja dengan pertimbangan telah memenuhi syarat dan dipandang cakap oleh pimpinan untuk menjalankan dan mempertanggung jawabkan tugasnya dalam menjalankan program dan kegiatan-kegiatan di dalamnya.

Dengan diterapkannya hal tersebut di atas maka dalam proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya akan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam kedinasan sehingga penilaian kinerja yang bersangkutan dapat terukur dan berjalan sebagaimana mestinya. Penerapan mekanisme tersebut membawa pengaruh terhadap proses implementasi baik pada tercapainya sasaran maupun pemahaman terhadap tolok ukur serta indikator program dan kegiatan, apabila pengelola program dalam proses implementasinya ditangani oleh bidang lain atau pihak yang tidak berkompeten maka hasilnya akan berada di bawah harapan yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sumber daya manusia dalam proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya berjalan secara efektif sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010) bahwa sumberdaya yang paling penting dalam menerapkan kebijakan adalah staf, dan jika dihubungkan penjelasan oleh para informan mengenai kapasitas sumberdaya manusia maka para pelaksana kebijakan adalah orang-orang yang tepat dan punya kemampuan sehingga pelaksanaan sasaran dan capaian program secara keseluruhan dapat diselesaikan.

b. Sumberdaya Anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat menentukan dalam proses atau berjalannya sebuah implementasi. Anggaran sangat mempengaruhi pelaksanaan program karena hampir seluruh aktivitas dalam menjalankan program

memerlukan dukungan pendanaan yang tentu saja dana yang telah direncanakan dan teranggarkan untuk program tersebut.

Namun angka anggaran yang direncanakan atau diusulkan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau masih harus melalui tahapan pembahasan hingga sampai pada ketetapan anggaran, dan yang terjadi adalah bisa saja anggaran untuk program dan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan tersebut. Anggaran yang ditetapkan bisa saja bertambah atau berada di bawah angka yang diusulkan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Usulan Anggaran dan Anggaran Yang Ditetapkan untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tahun Anggaran 2013	
	Usulan dalam Renja (Rencana Kerja)	Anggaran yang ditetapkan
1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	600.000.000,-	450.000.000,-
2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	250.000.000,-	62.628.000,-
3. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	850.000.000,-	429.700.000,-
4. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	325.000.000,-	83.635.000,-

5.	Pengelolaan dan Penambahan Koleksi Pada Museum dan Keraton	500.000.000,-	155.760.000,-
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Tahun Anggaran 2014	
		Usulan dalam Renja (Rencana Kerja)	Anggaran yang ditetapkan
1.	Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	400.000.000,-	500.000.000,-
2.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	1.500.000.000,-	4.500.000.000,-
3.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	500.000.000,-	315.230.000,-
4.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	500.000.000,-	0
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Tahun Anggaran 2015	
		Usulan dalam Renja (Rencana Kerja)	Anggaran yang ditetapkan
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	500.000.000,-	316.720.000,-
2.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	1.528,068,600,-	143.500.000,-
3.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	2.000.000.000,-	2.236.340.000,-
4.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	2.687.570.600,-	281.500.000,-

Sumber Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5 didapatkan keterangan bahwa :

...”Anggaran termasuk hal yang sangat menentukan karena pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya wujudnya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBD Kab. Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Kesimpulannya adalah bahwa besar kecilnya anggaran akan membawa dampak pada komposisi dan hasil kegiatan.
(Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Apa yang dikemukakan oleh informan 1 tersebut berdasarkan tugas dan fungsi beliau sebagai pejabat struktural yang berperan sangat besar dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD. Pernyataan tersebut tentu saja gambaran apa yang terjadi di Bidang Kebudayaan sebagai pelaksana program tersebut sehingga Informan 2 selaku penanggung jawab program pun mengemukakan hal yang serupa bahwa:

...”Benar sekali, besaran anggaran yang dialokasikan pada program pengelolaan kekayaan budaya merupakan hal yang mempengaruhi capaian target dan keberhasilan kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Besaran anggaran yang ada tentunya akan berpengaruh pula pada teknis kegiatan sehingga Informan 3 melengkapi hal tersebut dengan jawaban bahwa :

...”Anggaran program pengelolaan kekayaan budaya memang terlihat besar akan tetapi event dan item kegiatannya juga selalu bertambah atau malah menurun sehingga terkadang harus memilih skala prioritas yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2014, anggaran untuk program pengelolaan kekayaan budaya melonjak naik akan tetapi jumlah kegiatan berkurang. Hal tersebut malah menjadikan beberapa target pengelolaan kekayaan budaya menjadi terhenti. Walaupun secara keseluruhan anggaran naik tetapi beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Harapan kami ada

keseimbangan kenaikan anggaran dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Tabel. 4.3
Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2013

	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	450.000.000,-	337.672.650,-	75,04
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	62.628.000,-	36.649.800,-	58,52
3.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	429.700.000,-	422.278.900,-	98,27
4.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	83.635.000,-	51.865.700,-	62,01
5.	Pengelolaan dan Penambahan Koleksi Pada Museum dan Keraton	155.760.000,-	130.380.374,-	83,71

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

1. 100 = Amat Baik
2. 80 – 100 = Baik
3. 50 – 79 = Cukup
4. < 50 = Kurang

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2013.

Demikian dapat diketahui bahwa dampak besar kecilnya anggaran termasuk prioritas dalam implementasi program dan bahkan membawa dampak pada teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Realisasi anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan dipandang telah memberikan dukungan terhadap implementasi program hanya saja belum ada konsistensi dalam penganggaran, akibat adanya kenaikan anggaran yang besar pada salah satu kegiatan mengakibatkan kegiatan-kegiatan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Berikut penjelasan oleh Informan 6 bahwa :

...“Ya, realisasi anggaran dan semua bentuk pertanggung jawaban keuangan terlaksana dengan baik dan dipenuhi oleh pelaksana program tersebut, sebagaimana capaian pelaksanaan realisasi anggaran setidaknya telah sangat mendekati targetnya. Pada tahun 2014 anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya naik dengan prosentase yang cukup signifikan tapi hanya pada satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
(Wawancara hari Senin, 16 Januari 2017).

Tabel. 4.4
Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2014

	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	Prosentase
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	500.000.000,-	364.761.000,-	72,95
2.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	4.500.000.000,-	4.340.396.705,-	96,45
3.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	315.230.000,-	282.753.100,-	89,70

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d <70 : Cukup Berhasil

0 s/d <55 : Tidak Berhasil

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2014.

Dengan demikian yang harus menjadi perhatian sebenarnya adalah dukungan anggaran untuk semua kegiatan, dan yang harus dihindari adalah beberapa kegiatan yang masih dirasa minim anggaran sehingga perlu dukungan anggaran yang lebih besar lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dikemukakan dalam informasi yang diberikan oleh Informan 4 bahwa :

...“Anggaran yang ada sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program, hanya saja besarnya anggaran belum mampu mengakomodir secara keseluruhan pengelolaan beberapa potensi kekayaan budaya seperti atraksi budaya, beberapa benda budaya serta beberapa kampung yang menunggu ditetapkan menjadi kampung budaya dan sebagainya dan telah diinventarisir. Kenaikan anggaran pada tahun 2014 sangat menggembirakan karena even budaya menjadi bertambah lebih meriah, tapi cukup disayangkan hanya pada salah satu kegiatan. Yang kami harapkan adalah semua kegiatan dapat ditingkatkan anggarannya sehingga kami tidak perlu mengorbankan kegiatan-kegiatan yang lain.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Keterangan tersebut ditegaskan dan dijelaskan pula oleh Informan 2 bahwa :

...“Ya, anggaran terealisasi dengan baik, hanya saja jika dicermati kenaikan anggaran seperti yang terjadi pada tahun 2014 memang membawa dampak positif pada terselenggaranya even budaya dalam

rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau, namun secara spesifik terhadap seluruh kegiatan yang ada belum maksimal karena beberapa kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan tahun 2013 karena minimnya anggaran dan lebih prioritas pada even budaya sehingga tidak kami laksanakan tahun 2013. Pada tahun 2015 anggaran kembali menurun tetapi harus melakukan penambahan item kegiatan, sehingga dapat dikatakan anggaran yang tersedia untuk program pengelolaan kekayaan budaya tidak stabil, namun secara keseluruhan efektifitas pelaksanaan tetap kami jaga.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Tabel. 4.5
Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2015

	KEGIATAN	ANGGARAN (Murni+APBDP)	REALISASI	Prosentase
1	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	2,236,340,000,-	2,138,119,100,-	100
2	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	316,720,000,-	227,537,000,-	85
3	Pendukungn Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	281,500,000,-	264,498,200,-	100
4	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	143,500,000	130,448,000	100

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1.	n/a	Tidak Ada Target
2.	< 100%	Tidak Tercapai
3.	= 100%	Tercapai
4.	> 100%	Melebihi Target

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2015.

Kebutuhan anggaran menjadi salah satu prioritas dalam implementasi program, dan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan implementasi program yang harus dihadapi oleh para pelaksananya karena realisasi anggaran menentukan penilaian dan capaian kinerja. Edward III dalam Widodo (2010) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan Edward III tersebut tidak sejalan dengan proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau karena data wawancara membenarkan bahwa ketersediaan anggaran yang dipandang minim dan tidak stabil mempengaruhi jumlah kegiatan dan sarannya, akan tetapi secara keseluruhan program tersebut tetap berjalan dan terlaksana dengan baik yang dapat dilihat pada tabel realisasi program dan kegiatan serta anggarannya. Jumlah anggaran berdasarkan hasil wawancara secara umum dikeluhkan oleh para implementor tetapi disposisi atau sikap para implementor tidak terpengaruh, karena melaksanakan atau mengimplementasikan Program

Pengelolaan Kekayaan Budaya merupakan tanggung jawab yang terdapat dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah daerah. Sehingga walaupun ketersediaan jumlah anggaran minim akan dilaksanakan dengan serius, efektif dan sesuai dengan target serta sasaran yang telah ditetapkan.

c. Sumberdaya Peralatan

Peralatan atau fasilitas menjadi penentu pula dalam melaksanakan sebuah program, karena walaupun seluruh sumberdaya telah cukup tanpa ditunjang oleh peralatan atau fasilitas yang mampu mengimbangnya maka akan ada ketimpangan atau akan memperlambat kinerja yang diharapkan. Dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau tidak menjadi hambatan yang besar walaupun demikian harus dibuat solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3, didapatkan informasi bahwa :

... “Peralatan sebagai penunjang proses administrasi kami rasa masih baik dan lengkap. Kalau yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan kegiatan dalam Program yang perlu diperhatikan adalah peralatan pendokumentasian.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Secara lebih jelas dan mendukung pernyataan di atas oleh Informan 5 memberikan informasi bahwa :

...“Sarana dan peralatan perkantoran yang ada dalam kondisi yang baik sehingga pekerjaan administrasi program dapat terselesaikan dengan baik, sarana mobilitas opsional juga mampu mengakomodir kegiatan. Berdasarkan permintaan yang sering dikemukakan dalam rapat evaluasi

oleh Bidang Kebudayaan meminta agar SKPD dapat mengadakan peralatan dokumentasi seperti kamera untuk menunjang kegiatan. (Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Pernyataan yang dibuat Edward III tersebut dapat dibenarkan dalam penelitian ini, karena secara keseluruhan informan yang tentu saja merupakan bagian dari implementor program menyatakan bahwa fasilitas perkantoran yang ada cukup memberikan ruang gerak dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk pernyataan mengenai pentingnya untuk memenuhi kebutuhan tentang alat dokumentasi untuk menghasilkan dokumentasi kegiatan yang akan diolah sebagai bahan promosi wisata, menunjukkan ada faktor yang membatasi atau penghambat proses implementasi program, walaupun tidak mempengaruhi secara keseluruhan proses tersebut.

d. Sumberdaya Kewenangan

Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas maka bagi personil atau aparatur yang ditetapkan sebagai pengelola Program Pengelolaan Kekayaan Budaya maka wewenang dan tanggung jawab secara otomatis akan diberlakukan.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Informan 1 bahwa :

...“Ya, dengan adanya ketetapan SK maka pengelola program dalam lingkup Bidang Kebudayaan diberikan kewenangan untuk melaksanakan

program dan kegiatan sebagaimana tolok ukur kegiatan. Pengelola juga mempunyai kewenangan menandatangani dokumen-dokumen administrasi dan keuangannya.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Kemudian Informan 2 juga memberikan pernyataan yang lebih memperjelas bahwa :

...“Kewenangan kami sebagai pengelola program dan kegiatannya adalah melaksanakan secara teknis dan anggaran program dan kegiatan hingga tuntas dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dalam satu tahun anggaran.

(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Sebuah kewenangan tentu saja akan memberikan pengaruh bagi siapa saja yang melaksanakan sebuah program. Dengan sebuah kewenangan maka program dan kegiatannya akan berjalan karena dalam hal ini kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi serta Staf yang terlibat sebagai pelaksana program akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya apabila kewenangan teknis yang menyangkut penetapan hal-hal teknis seperti waktu dan mekanisme kegiatan serta realisasi anggaran dan sebagainya telah diserahkan kepada mereka.

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat

keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis para implementor telah diberikan kewenangan dalam sebuah surat keputusan oleh Kepala SKPD untuk mengelola program dan kegiatan, baik dalam hal teknis maupun melaksanakan realisasi anggarannya yang merupakan hal yang sangat mendasar dan hal tersebut relevan sekali dengan pernyataan Edward III.

3. Disposisi/ Sikap Aparatur

Disposisi atau sikap aparatur merupakan variabel yang sangat mempengaruhi implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Disposisi tersebut berupa dukungan atau sikap aparatur pejabat atau pimpinan agar implementasi program tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai bentuk disposisi dalam rangka keseriusan menjalankan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, maka Kepala Dinas selaku pejabat yang memegang tanggung jawab terbesar terhadap seluruh program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD membuat agenda yang bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan menjalankan fungsi evaluasi terhadap berjalannya program dan kegiatan maupun realisasi anggaran program. Evaluasi tersebut dilakukan agar pelaksana program di Bidang Kebudayaan agar tetap konsisten dengan rencana program, target dan sasaran, waktu pelaksanaan

serta pengendalian anggaran. Seperti hasil wawancara dengan Informan 1 yang menyatakan bahwa :

...”Ya, Kepala Dinas setiap bulan melalui sekretariat meminta laporan bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebagai bahan rapat evaluasi.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Informan 5 yang mengatakan bahwa :

....”Setiap program dan kegiatan tentunya dipantau pelaksanaannya. Setiap bulan dan triwulan secara berkala Kepala Dinas mewajibkan pengelola program wajib membuat laporan dan hasilnya akan dievaluasi. Apabila ada kendala maka pimpinan SKPD akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahasnya atau diberikan teguran apabila masalah tersebut merupakan kelalaian dari pengelola program.
(Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Pendapat tersebut melengkapi keterangan yang diberikan oleh Informan 1, ternyata tidak hanya setiap bulan akan tetapi pada setiap triwulan berjalannya program Kepala Dinas akan melakukan evaluasi secara berkala serta memberikan teguran serta pengarahan atas kelalaian pengelola atau pelaksana program. Tidak hanya sampai disana peneliti juga menanyakan melalui wawancara hal yang sama kepada Informan 2 selaku penanggung jawab program dan peneliti mendapatkan keterangan yang sejalan bahwa :

...”Benar, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan maka kami menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan sebagai bahan mengevaluasi pelaksanaan program dan setelah itu masukan serta arahan dari Kepala Dinas disampaikan secara langsung kepada pengelola program melalui Sekretaris kepada saya selaku PPK dan kemudian akan kami bahas internal lagi dengan bawahan saya yaitu dengan PPTK dan staf administrasinya.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Dan pernyataan tersebut menjadi lebih meyakinkan lagi setelah didapatkan keterangan yang sama dari Informan 6 bahwa :

...”Ya, Kepala Dinas selaku pengguna anggaran selalu menginstruksikan agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan dengan waktu dan alokasi anggaran, sehingga saya selaku Kepala Sub Bagian Keuangan disertai tanggung jawab untuk memberikan peringatan atau teguran kepada pengelola program atau kegiatan agar realisasi kegiatan dan keuangannya dapat berjalan efektif dan terkondisi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Teguran ini berlaku untuk semua pengelola atau pelaksana program mulai dari PPK, PPTK dan staf pengelola administrasi atau bendaharanya.
(Wawancara hari Senin, 16 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai disposisi/ sikap aparatur pejabat atau pimpinan secara berjenjang ke bawah dalam mengimplementasikan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah menunjukkan disposisi atau sikap yang serius dan konsisten terhadap apa saja yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk dan teknis pelaksanaannya.

Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pendapat tersebut dibuktikan

berdasarkan hasil penelitian ini. Terbukti dengan keseriusan dan konsistensi masing-masing atasan secara berjenjang ke bawah hingga pada stafnya selalu dilakukan mekanisme pengendalian dan pengawasan agar proses implementasi tetap berjalan pada ketentuan dan aturan yang telah dijelaskan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan serta memberikan sanksi teguran hingga sanksi administrasi sebagai bentuk sikap yang telah mendorong terlaksananya implementasi program tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel yang berpengaruh terhadap implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dikarenakan apabila variabel-variabel baik komunikasi, sumberdaya dan disposisi telah berjalan secara efektif, akan tetapi jika pada variabel struktur birokrasi tidak sesuai dengan kebutuhan implementasi program maka akan terjadi ketimpangan atau kerancuan dalam melaksanakannya karena secara teknis dan tanggung jawab yang diimbang oleh pengelola atau pelaksana program. Dalam mengimplementasikan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau mengacu pada struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) struktural yang berlaku pada Bidang Kebudayaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau sehingga secara teknis kedinasan baik Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Dinas akan sebagai

pengelola atau pelaksana Program Pengelolaan Kekayaan Budaya akan menjalankan tugasnya sesuai dengan target kinerja berdasarkan tupoksinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa apabila implementasi program diserahkan kepada bidang yang lain maka variabel-variabel yang lain tidak akan mampu berjalan secara lebih efektif.

Struktur birokrasi merupakan hal yang mendasari hingga Bidang Kebudayaan menjadi pengelola atau pelaksana implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, karena secara kedinasan tugas-tugas pengelolaan kekayaan budaya menjadi pekerjaan Bidang Kebudayaan beserta jajarannya. Indikator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagai pemangku Urusan Wajib/ Urusan Kebudayaan di Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mengelola kekayaan budaya daerah di Kabupaten Berau dilaksanakan oleh Bidang Kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 2 didapatkan keterangan bahwa :

...”Ya, sebagaimana penjelasan saya dari pertanyaan sebelumnya bahwa para pejabat struktural sebagai penanggung jawab, pelaksana teknis serta menunjuk staf pengelola keuangannya kami usulkan sesuai dengan Bidang, Seksi serta tupoksinya sehingga dapat saling bersinergi.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan tersebut dibenarkan oleh Informan 1 yang memberikan keterangan bahwa :

...”Ya, kami menunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran para pejabat struktural sebagai penanggung jawab, pelaksana teknis serta menunjuk staf pengelola keuangannya sesuai dengan Bidang, Seksi serta tupoksinya.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Untuk lebih meyakinkan kami mewawancarai Informan 3 dan diungkapkan bahwa :

...”Untuk diketahui bahwa komposisi pengelola program diusulkan dan ditetapkan dari aparatur atau PNS di Bidang Kebudayaan dan Seksi yang sesuai dengan tanggung jawab dalam uraian tugasnya berdasarkan struktur organisasi.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun dan menunjuk komposisi dalam pengelola atau pelaksana implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah menerapkan ketentuan bahwa harus punya relevansi dengan tugas dan fungsi dalam kedinasan sehingga apa yang menjadi tanggung jawab sebagai *implementor* tetap berpegang kepada target kinerja Bidang Kebudayaan.

Dengan adanya penetapan pengelola atau pelaksana implementasi program maka ada hal penting yang lain yang juga perlu dijadikan penilaian berjalannya implementasi proram yaitu mengenai rentang kendali berdasarkan struktur orgnisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Informan 2 yang selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengelolaan Kekayaan Budaya menyatakan bahwa :

...”Berdasarkan yang kami alami selama menjalankan tugas melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya, struktur organisasi SKPD khususnya di Bidang Kebudayaan tidak menjadikan permasalahan rentang kendali karena susunan garis koordinasi cukup sederhana dan jelas, mulai dari Kepala Bidang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Seksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan staf pengelola keuangan juga merupakan staf seksi yang sama sehingga sangat mudah untuk diawasi dan dikendalikan. (Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan tersebut didukung oleh keterangan dari Informan 4 yang berpendapat bahwa:

...”berdasarkan komposisi struktur SKPD khususnya pada Bidang Kebudayaan sebagai pengelola program pengelolaan kekayaan budaya secara teknis hanya melibatkan seksi-seksi yang bersangkutan ditambah staf sesuai dengan kebutuhan sehingga pengawasan lebih mudah. (Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Keterangan yang lainpun kami dapatkan dari hasil wawancara dengan Informan 6, didapatkan informasi bahwa :

...”Menurut pendapat saya selama melakukan pelayanan administrasi dan realisasi anggaran khususnya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bisa dikatakan tidak ditemukan kerancuan dalam rentang kendali dan pengawasan pelaksanaannya terlebih pada masalah anggaran atau keuangan. Semuanya berjalan dengan baik mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan hingga staf yang ditunjuk sebagai pengelola administrasi dan keuangan mengetahui tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. (Wawancara hari Senin, 16 Januari 2017).

Rentang kendali serta pengawasan sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi berdasarkan pernyataan di atas. Tugas pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal Bidang Kebudayaan, akan tetapi secara khusus Sub Bagian Keuangan juga merupakan pengendali utama dalam realisasi anggaran. Struktur birokrasi disini juga

termasuk hubungan kerja antara pelaksana program dengan bagian yang lain seperti Sub Bagian Keuangan yang menangani realisasi anggaran dan Sub Bagian Penyusunan Program yang menangani evaluasi program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5 didapatkan keterangan bahwa :

...”kami selaku bagian yang melakukan tugas pengawasan dan evaluasi implementasi program-program yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, khususnya Bidang Kebudayaan dengan komposisi pelaksana program dan kegiatan yang tugas administrasi dan keuangan hanya ditangani oleh beberapa orang saja, maka menjadi lebih efektif dan efisien dalam birokrasinya. Dimulai dengan Kepala Bidang, Kepala Seksi hingga staf menjadi lebih dengan alur koordinasi yang relatif pendek sehingga mengkoordinasikan bahan evaluasi lebih cepat dan efektif. (Wawancara hari Kamis, 12 Januari 2017).

Dari beberapa hasil wawancara berupa penjelasan dan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi atau struktur organisasi tidak begitu mempengaruhi implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Hal tersebut dikarenakan pada fungsi pengawasan dan pengendalian telah mengikuti pola struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan meletakkan fungsi pengawasan oleh atasan atau pimpinan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berikut pernyataan yang membenarkan pernyataan di atas dari Informan 1 bahwa :

...”Struktur yang ada tidak mengakibatkan rentang kendali semakin lemah, karena pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada pada program pengelolaan kekayaan budaya dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi SKPD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi bidang, seksi yang ada. Adapun

koordinasinya tidak terlalu panjang yaitu Dimulai dari Kepala Dinas kemudian ke Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf. Menurut saya sangat cukup mudah dan tidak terlalu panjang.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Dengan struktur birokrasi dan organisasi yang tidak terlalu panjang maka berpengaruh pada proses implementasi program, karena proses pengawasan dalam rentang kendali implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan menjadi terdukung dengan mudahnya terealisasinya kewenangan, tanggung jawab semua pelaksana atau pengelola program maupun pejabat struktural yang terkait dengan proses implementasi.

Struktur birokrasi mempengaruhi sebuah implementasi program atau kebijakan secara universal dan bersifat koordinatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa struktur birokrasi para pelaksana (*implementors*) lebih sederhana dan dipengaruhi oleh tugas dan fungsinya selaku aparatur pemerintah daerah. Hal tersebut menjadikan para pelaksana secara teknis memahami tugas masing-masing sehingga kinerja berjalan secara efektif karena struktur yang dimiliki lebih efisien, sebagaimana penjelasan Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa struktur organisasi mempengaruhi seluruh komponen yang lain

terutama pada kewenangan, koordinasi dan sikap para pelaksananya, seperti yang dijelaskan mengenai pada bagian pengaruh struktur birokrasi terhadap rentang kendali pelaksanaan. Jelas sekali bahwa struktur organisasi yang oleh Edward III dijadikan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi dapat ditemukan dalam proses implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah diimplementasikan dengan baik, benar dan efektif. Walaupun masih terdapat kendala atau pembatas, akan tetapi tidak sampai kepada terjadi kegagalan atau tidak tercapainya target serta sasaran yang telah ditetapkan.

E. Hasil Penelitian Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.

Sebuah kebijakan baik itu berupa program dalam proses pelaksanaannya tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tanpa adanya faktor-faktor yang membuat program tersebut terlaksana dengan baik ataupun tidak. Analisis faktor-faktor tersebut sebenarnya sudah dapat dilihat pada hasil penelitian atau analisis implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya di atas, hanya disini peneliti akan mengungkapkan secara singkat hasil penelitian terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau dari keterangan beberapa informan yang melaksanakan atau pengelola program dan kegiatan, dalam hal ini adalah pejabat struktural pada Bidang Kebudayaan.

Berdasarkan komponen-komponen yang mempengaruhi implementasi pada subfokus penelitian dapat ditemukan faktor-faktor mana saja yang mendukung implementasi program yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi dipandang sangat mendukung implementasi karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan hasilnya dapat menentukan keberhasilan program, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 2 bahwa:

...” Ya, pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya diawali dengan rapat sekaligus arahan dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Program tersebut.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan tersebut didukung dan diperjelas pula oleh Informan 3 bahwa:

...”Bentuk Komunikasi antara Kepala Dinas atau Sekretaris, akan mengadakan rapat serta pengarahan terhadap apa saja dan bagaimana melaksanakan program serta sekaligus membahas kesiapan penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program pengelolaan kekayaan budaya. Rapat ini umumnya diikuti oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi yang terkait dengan programnya serta staf pengelola administrasi kegiatan dan keuangannya.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

2. Sumberdaya

Sumberdaya terdiri dari empat bagian yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Diantara ke empat

bagian tersebut tiga bagian sangat mendukung implementasi hanya satu bagian saja yang dianggap sebagai penghambat implementasi program yaitu sumberdaya anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3, didapatkan keterangan bahwa:

...” Ya, kami selaku Kepala Seksi Pengembangan Seni dan Nilai Tradisi ditunjuk oleh Kepala Bidang Kebudayaan untuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis alasannya adalah terkait dengan tupoksi dan penilaian kinerja sehingga memang telah sesuai dengan kaedah yang berlaku dan kebijakan kepala dinas. Begitu pula staf bendahara yang membuat pertanggungjawaban keuangan telah dianggap cakap dan mampu.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Keterangan yang menyatakan faktor penghambat implementasi program berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 bahwa:

...”Anggaran yang ada sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program, hanya saja besarnya anggaran belum mampu mengakomodir secara keseluruhan pengelolaan beberapa potensi kekayaan budaya seperti atraksi budaya, beberapa benda budaya serta beberapa kampung yang menunggu ditetapkan menjadi kampung budaya dan sebagainya dan telah diinventarisir. Kenaikan anggaran pada tahun 2014 sangat menggembirakan karena even budaya menjadi bertambah lebih meriah, tapi cukup disayangkan hanya pada salah satu kegiatan. Yang kami harapkan adalah semua kegiatan dapat ditingkatkan anggarannya sehingga kami tidak perlu mengorbankan kegiatan-kegiatan yang lain.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Keterangan yang memberikan informasi yang sama diungkapkan oleh informan 3 bahwa:

...”“Anggaran program pengelolaan kekayaan budaya memang terlihat besar akan tetapi event dan item kegiatannya juga selalu bertambah atau malah menurun sehingga terkadang harus memilih skala prioritas yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2014, anggaran untuk program pengelolaan kekayaan budaya melonjak naik akan tetapi jumlah kegiatan berkurang. Hal

tersebut malah menjadikan beberapa target pengelolaan kekayaan budaya menjadi terhenti. Walaupun secara keseluruhan anggaran naik tetapi beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Harapan kami ada keseimbangan kenaikan anggaran dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Sumberdaya peralatan juga dipandang sebagai faktor yang mendukung implementasi program karena secara garis besar semua pekerjaan administrasi dapat terselesaikan dengan baik, walaupun ada yang dipandang kurang tetapi tidak mempengaruhi substansi implementasi. Hal tersebut dikemukakan oleh informan 3 bahwa:

...”Peralatan sebagai penunjang proses administrasi kami rasa masih baik dan lengkap. Kalau yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan kegiatan dalam Program yang perlu diperhatikan adalah peralatan pendokumentasian.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Hal senada diutarakan oleh informan 4 bahwa:

...”Dalam hal administrasi peralatan perkantoran cukup memadai, tapi agar lebih baik lagi apabila pelaksanaan program dan kegiatannya ditunjang dengan peralatan penunjang dalam hal pendokumentasian.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Adapun sumberdaya kewenangan dipandang sebagai faktor yang mendukung implementasi program karena merupakan sebuah tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pengelola program dan kegiatan sehingga dilaksanakan dengan baik karena akan mempengaruhi nilai kinerja dan hasil yang akan dicapai. Sebagaimana keterangan yang diberikan Informan 2 bahwa:

...”Kewenangan kami sebagai pengelola program dan kegiatannya adalah melaksanakan secara teknis dan anggaran program dan kegiatan hingga tuntas dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dalam satu tahun anggaran.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

3. Disposisi/ Sikap Aparatur

Sikap aparatur merupakan salah satu komponen subfokus yang mempengaruhi implemementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Sikap aparatur dalam penelitian ini adalah faktor yang mendukung implementasi sebagaimana keterangan yang terungkap dari Informan 2 bahwa:

...” Benar, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pimpinan maka kami menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan sebagai bahan mengevaluasi pelaksanaan program dan setelah itu masukan serta arahan dari Kepala Dinas disampaikan secara langsung kepada pengelola program melalui Sekretaris kepada saya selaku PPK dan kemudian akan kami bahas internal lagi dengan bawahan saya yaitu dengan PPTK dan staf administrasinya.
(Wawancara hari kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan yang mendukung pernyataan tersebut di atas diutarakan oleh Informan 4 bahwa:

...”Sebagaimana bentuk keseriusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Beru dalam implementasi program pengelolaan kekayaan budaya, Kepala SKPD dan Kepala Bidang saling berkoordinasi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Disposisi atau sikap aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau yang sangat serius dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pelaksana program karena tugas tersebut adalah bagian tanggung jawab dan tugas mereka

sebagai Aparatur Sipil Negara, disamping itu pula karena berhubungan dengan anggaran sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak sampai terjadi pelanggaran yang akan berpengaruh tidak baik pada implementasi program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penelitian ini juga adalah faktor yang mendukung implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sebagaimana penjelasan dari hasil wawancara yang didapat dari Informan 2 bahwa:

...”Ya, sebagaimana penjelasan saya dari pertanyaan sebelumnya bahwa para pejabat struktural sebagai penanggung jawab, pelaksana teknis serta menunjuk staf pengelola keuangannya kami usulkan sesuai dengan Bidang, Seksi serta tupoksinya sehingga dapat saling bersinergi.
(Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Keterangan ini mungkin ada kaitannya dengan disposisi atau sikap aparatur, karena ada hubungan atau korelasi antara sikap aparatur pelaksana program dengan struktur organisasi yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan Informan 2, didukung pula oleh keterangan yang didapat dari informan 4 bahwa:

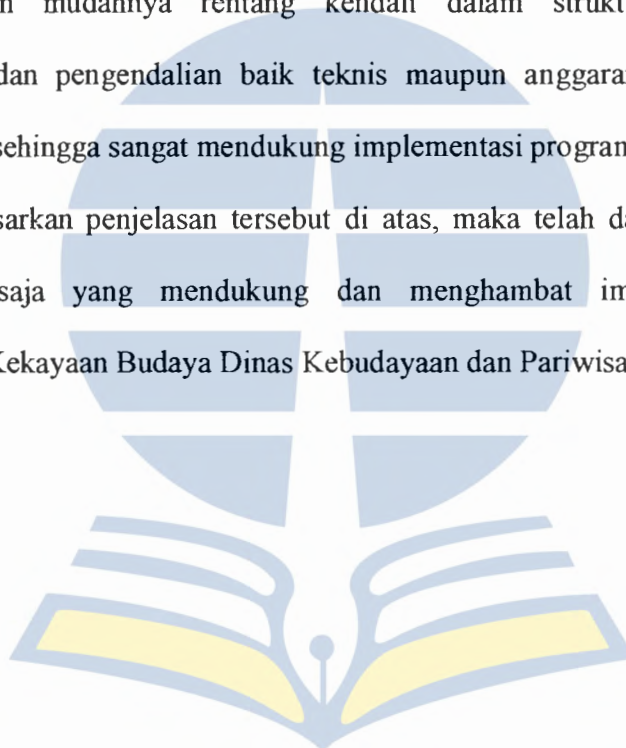
...”Untuk diketahui bahwa komposisi pengelola program diusulkan dan ditetapkan dari aparatur atau PNS di Bidang Kebudayaan dan Seksi yang sesuai dengan tanggung jawab dalam uraian tugasnya berdasarkan struktur organisasi.
(Wawancara hari Senin, 9 Januari 2017).

Struktur organisasi pula tidak menyebabkan rentang kendali implementasi program menjadi bermasalah, hal ini diungkapkan pula oleh Informan 2 bahwa:

...”Berdasarkan yang kami alami selama menjalankan tugas pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya, struktur organisasi SKPD khususnya di Bidang Kebudayaan tidak menjadikan permasalahan rentang kendali karena susunan garis koordinasi cukup sederhana dan jelas, mulai dari Kepala Bidang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Seksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan staf pengelola keuangan juga merupakan staf seksi yang sama sehingga sangat mudah untuk diawasi dan dikendalikan. (Wawancara hari Kamis, 5 Januari 2017).

Dengan mudahnya rentang kendali dalam struktur organisasi maka pengawasan dan pengendalian baik teknis maupun anggaran menjadi terlaksana dengan baik, sehingga sangat mendukung implementasi program.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka telah dapat dipahami faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti berkesimpulan bahwa implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau telah berjalan dengan cukup baik, dan secara keseluruhan program dan kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi jika dianalisis berdasarkan teori yang digunakan yaitu Teori Erward III belum sepenuhnya proses implementasi berjalan baik. Implementasi program tersebut dianalisis berdasarkan beberapa komponen yang mempengaruhi prosesnya sehingga ditemukan beberapa faktor pendukung maupun penghambat, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, sebagai berikut:

- a. Komunikasi

Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pariwisata dan Kabupaten Berau dalam melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya adalah langkah awal yang menentukan proses berjalannya program. Kegiatan rapat dan pengarahan dilakukan guna menjelaskan target dan sasaran implementasi program yang ingin dicapai sehingga mempermudah pengawasan serta evaluasi hasil kegiatan.

b. Sumberdaya

Sumberdaya yang dikelola sebagai modal pelaksanaan implementasi program seperti sumberdaya manusianya telah sesuai dengan ketentuan teknis dan bidang kerjanya, sumberdaya anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah hanya saja bagi SKPD masih kurang sehingga tidak adanya konsistensi pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun, sumberdaya peralatan masih sangat memadai walaupun harus dilakukan penambahan seperti peralatan dokumentasi yang belum memadai akan tetapi tidak mempengaruhi substansi program, sedangkan sumberdaya kewenangan sejalan dengan tanggungjawab sebagai aparatur maka kewenangan yang diberikan digunakan agar program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Disposisi/ Sikap Aparatur

Aparatur yang terlibat dalam proses implementasi program tersebut mulai dari atasan hingga staf berupaya serius dan konsisten terhadap ketentuan yang berlaku baik administrasi maupun keuangan program sehingga pengawasan dan evaluasi selalu dilaksanakan agar tetap berada pada jalur untuk mendapatkan hasil dan sasaran program.

d. Struktur Birokrasi

Adapun peran struktur birokrasi dalam implementasi program sudah cukup jelas karena ada korelasi antara tugas pengelola program dengan tanggungjawabnya sebagai aparatur sehingga pelaksanaannya lebih mengacu pada capaian kinerja. Sedangkan rentang kendali yang terjadi

jika mengacu pada struktur organisasi lebih mudah dilakukan karena tanggungjawab pengelola program telah terikat oleh hubungan dinas sebagai aparatur.

2. Dalam implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau juga melibatkan faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat proses implementasi, antara lain:
 - a. Faktor-faktor yang mendukung proses implementasi program didasarkan pada kesimpulan di atas yaitu proses komunikasi dengan berbagai upaya untuk menghasilkan kebijakan agar implementasi program berjalan dengan baik, sumberdaya manusia yang memadai sesuai dengan syarat dan ketentuan, sumberdaya peralatan kantor yang masih cukup memadai dan mampu menunjang proses pengadministrasian dan pelaporan kegiatan, serta sumberdaya kewenangan telah dimanfaatkan sebagai alat pengendali dan evaluasi implementasi program.
 - b. Faktor yang menghambat proses implementasi program didasarkan pada jumlah kegiatan dan anggaran pada program pengelolaan kekayaan budaya yang tidak stabil disetiap tahun anggaran sehingga terkesan adanya inkonsistensi implementasi program.

B. Saran

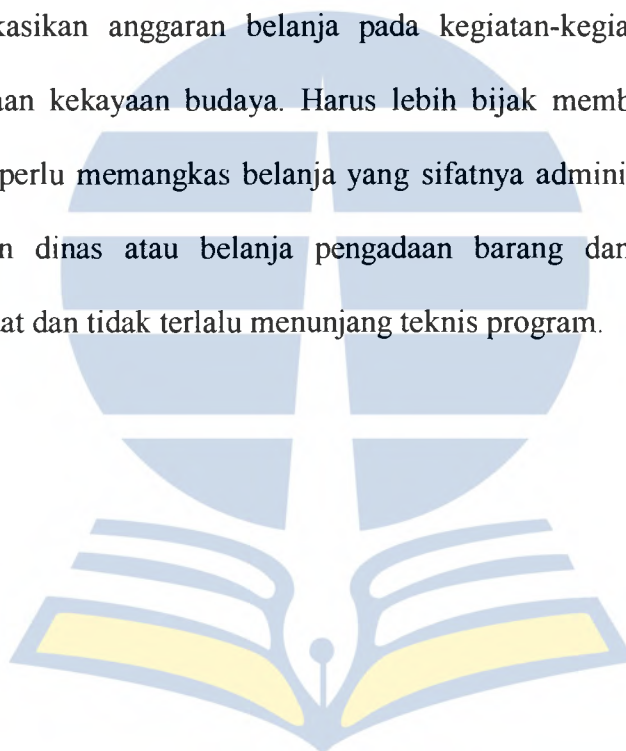
Mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat diajukan saran-saran yang dianggap perlu dan berguna untuk mempertahankan hasil implementasi yang berjalan cukup baik dengan faktor yang mendukungnya dan mengatasi faktor

yang menghambat implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, sebagai berikut:

1. Untuk lebih mengoptimalkan implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, dengan cara lebih banyak melakukan evaluasi terhadap sasaran dan target program. Setelah melakukan evaluasi harus ada revisi terhadap target capaian program yang lebih rasional dan seimbang dengan ketersediaan anggaran, sehingga program lebih terfokus pada kegiatan yang lebih prioritas saja dan yang dianggap kurang prioritas tidak perlu untuk dimasukkan dalam target kinerja tahunan.
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau agar mempertahankan faktor pendukung implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, baik komunikasi yang telah dibangun dengan baik, sumberdaya yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan jika ada yang masih dipandang kurang seperti anggaran yang dipandang berpengaruh pada hasil yang ingin dicapai, maka harus dilakukan adalah revisi terhadap target yang ingin dicapai sehingga apabila target dapat ditekan maka dengan kondisi anggaran yang fluktuatif lebih mudah untuk dicapai. Demikian pula halnya dengan pejabat struktural dan staf yang ditunjuk sebagai pengelola implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya yang telah sesuai dan ada korelasi antara tanggung jawab sebagai pengelola implementasi (implementors) dengan tugas pokok atau kinerjanya sebagai aparatur harus menjadi sebuah ketetapan, karena dengan demikian akan menghasilkan keseriusan dan upaya peningkatan kinerjanya dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan sehingga implementasi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kabupaten Berau dapat dilaksanakan sebagaimana target dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau agar dapat mensiasati faktor yang menghambat implementasi program dengan melakukan evaluasi terhadap mekanisme penganggaran, yang bertujuan agar anggaran yang tersedia lebih mengedepankan skala prioritas dan lebih proporsional dalam mengalokasikan anggaran belanja pada kegiatan-kegiatan dalam program pengelolaan kekayaan budaya. Harus lebih bijak membuat susunan belanja dan jika perlu memangkas belanja yang sifatnya administrasi seperti belanja perjalanan dinas atau belanja pengadaan barang dan jasa yang kurang bermanfaat dan tidak terlalu menunjang teknis program.



DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, Solichin, Abdul. (1997), *Evaluasi kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Admnistrasi Universitas Brawijaya dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, Malang.
- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Agustinus, Leo. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Bandung.
- Rohman, Arif. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Dunn, William N. (1998), *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. (2000). *Metodologi Penelitian*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Antropologi I*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia, Malang.
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra.(1994) *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryana, Siti Erna Latifi, (2009). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Tesis. Program magister Studi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 *Tentang Cagar Budaya*.

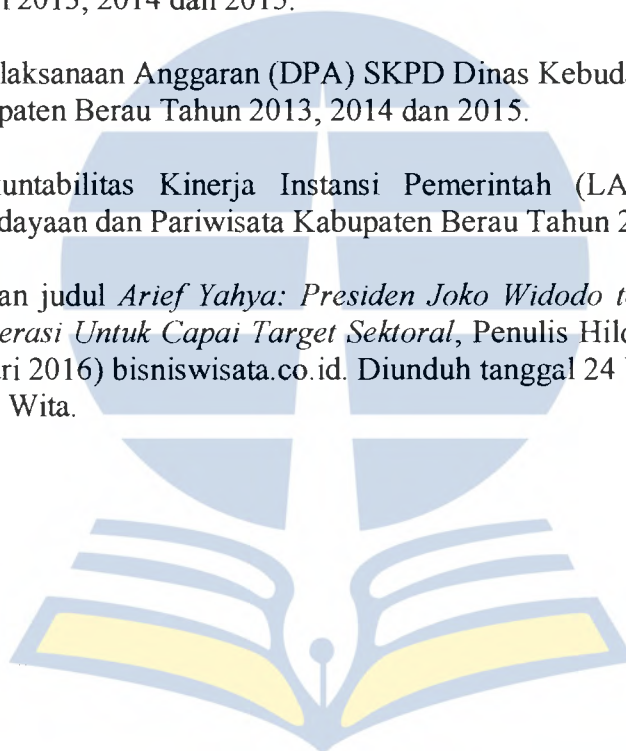
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 *Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan*.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Artikel dengan judul *Arief Yahya: Presiden Joko Widodo tetapkan 2016 Tahun Akselerasi Untuk Capai Target Sektoral*, Penulis Hilda Sabri Sulistyono (26 Januari 2016) bisniswisata.co.id. Diunduh tanggal 24 November 2016, jam 09.26 Wita.



PANDUAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN KUNCI

Nama Narasumber	:	
NIP	:	
Jabatan	:	
Alamat dan No. HP	:	
Tempat Wawancara	:	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau
Tanggal Wawancara	:	
Waktu Wawancara	:	
Pewawancara	:	Cipto Hanjono
Hasil Wawancara	:	
a. Komunikasi		
1. Pertanyaan	:	Apakah selalu dilaksanakan rapat dan pengarahan sebelum pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya?
Jawaban	:	
2. Pertanyaan	:	Apakah ada koordinasi antar bidang dalam melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya?
Jawaban	:	
b. Sumber Daya		
1. Pertanyaan	:	Apakah pejabat dan staf pengelola yang ditetapkan telah sesuai dengan kriteria dan kemampuan?
Jawaban	:	
2. Pertanyaan	:	Apakah anggaran yang tersedia memberikan dampak terhadap pelaksanaan program?
Jawaban	:	
3. Pertanyaan	:	Apakah anggaran yang ada terealisasi dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan implementasi program?
Jawaban	:	

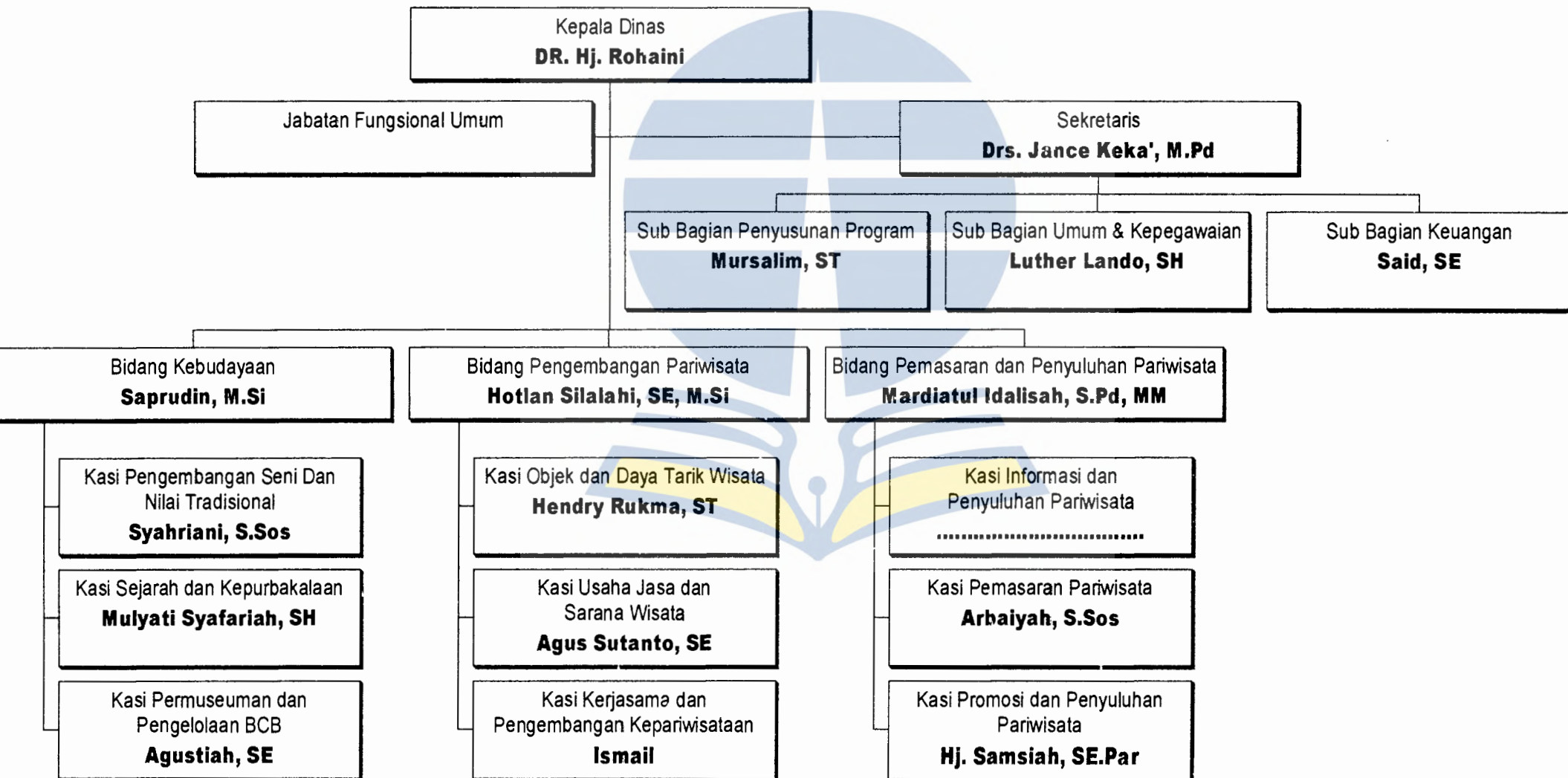
Jawaban	: Struktur yang ada tidak mengakibatkan rentang kendali semakin lemah, karena pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada pada program pengeloan kekayaan budaya dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi SKPD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi bidang, seksi yang ada. Adapun koordinasinya tidak terlalu panjang yaitu Dimulai dari Kepala Dinas kemudian ke Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf. Menurut saya sangat cukup mudah dan tidak terlalu panjang.
---------	---

Informan,

Drs. Jance Keka', M. Pd



**STRUKTUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BERAU**





UNIVERSITAS TERBUKA
 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Samarinda
 Jl. H.A.M.M. Rifadin, Samarinda Sebrang 75121
 Telepon. 0541-7269108, Faksimile 0541-7269109
 E-mail: samarinda@ut.ac.id

Nomor : 022/UN.31.46-11-2017 Samarinda, 09 Januari 2017
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Pengumpulan Data Penelitian
 Yth : Kepala DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
 BERAU.

Selubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Samarinda Pokjar Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : CIPTO HANJONO
 NIM : 500894888
 Judul : Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau
 Pembimbing : 1. Dr. Saipul M.Si
 2. Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul TAPM tersebut

Selubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Kepala DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU. Kirannya untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut mengadakan pengumpulan data.

Demikian permohonan ini kami sampaikan kirannya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala
 UPBJJ-UT Samarinda

Mejo Istianda, S.IP, M.Si
 NIP. 19670519 198701 2 001

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I dan III
2. Direktur PPs
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs



sPEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Pemuda No. 33 Telp. (0554) 21159 Tanjung Redeb

Tanjung Redeb, 19 Januari 2017

Nomor : 556/ 29 /Budpar-II.1/2017
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Izin Pengumpulan Data Penelitian

Kepada
Yth. Universitas Terbuka
Unit Program Jarak Jauh (UPBJJ-UT)
di -
Samarinda

Menindaklanjuti surat dari Universitas Terbuka Unit Program Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Samarinda Nomor : 022/UN31.46/LL/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) atas mahasiswa :

Nama : Cipto Hanjono
NIM : 500894888
Judul : Implementasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Oleh
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten

Pada prinsipnya kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau menyetujui permohonan Izin Pengumpulan Penelitian Data Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

H. Mappasikra Mappaselleng, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19581125 198503 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Universitas Terbuka UPBJJ-UT
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

**Data Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Kegiatan Tahun 2013,
2014 dan 2015**

No.	Program	Tahun Anggaran	Kegiatan
1	2	3	4
I	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air 3. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 4. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah 5. Pengelolaan dan Penambahan Koleksi Pada Museum dan Keraton
II	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 3. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah
III	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air 3. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

			4. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah
--	--	--	--

Sumber Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015.

Menyetujui dan mengesahkan,

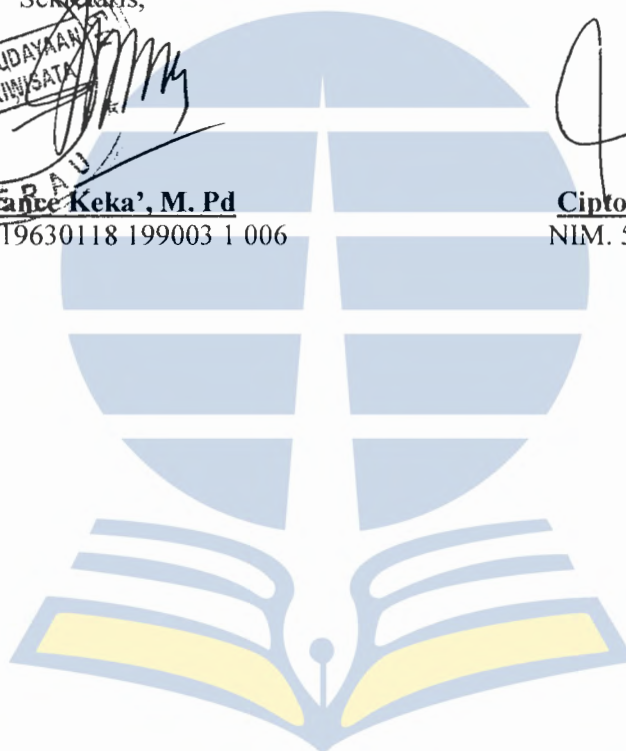
An. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau
Sekretaris,



Drs. Janice Keka', M. Pd
NIP. NIP. 19630118 199003 1 006

Pengumpul data,
Peneliti

Cipto Hanjono
NIM. 500894888



**Data Usulan Anggaran dan Anggaran Yang Ditetapkan untuk
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun Anggaran 2013,
2014 dan 2015**

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Tahun Anggaran 2013	
		Usulan dalam Renja (Rencana Kerja)	Anggaran yang ditetapkan
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	600.000.000,-	450.000.000,-
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	250.000.000,-	62.628.000,-
3.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	850.000.000,-	429.700.000,-
4.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	325.000.000,-	83.635.000,-
5.	Pengelolaan dan Penambahan Koleksi Pada Museum dan Keraton	500.000.000,-	155.760.000,-
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Tahun Anggaran 2014	
		Usulan dalam Renja (Rencana Kerja)	Anggaran yang ditetapkan
1.	Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	400.000.000,-	500.000.000,-
2.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	1.500.000.000,-	4.500.000.000,-
3.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	500.000.000,-	315.230.000,-
4.	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	500.000.000,-	0

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Tahun Anggaran 2015	
		Usulan dalam Renja (Rencana Kerja)	Anggaran yang ditetapkan
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	500.000.000,-	316.720.000,-
2.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	1.528,068,600,-	143.500.000,-
3.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	2.000.000.000,-	2.236.340.000,-
4.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	2.687.570.600,-	281.500.000,-

Sumber Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Menyetujui dan mengesahkan,

An. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau
Sekretaris,



Drs. Jance Keka', M. Pd
NIP. NIP. 19630118 199003 1 006

Pengumpul data,
Peneliti

Cipto Hanjono
NIM. 500894888

**DATA TARGET ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN DAN
INTERPRETASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA TAHUN 2013, 2014
DAN 2015**

**Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya Tahun 2013**

	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	450.000.000,-	337.672.650,-	75,04
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	62.628.000,-	36.649.800,-	58,52
3.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	429.700.000,-	422.278.900,-	98,27
4.	Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	83.635.000,-	51.865.700,-	62,01
5.	Pengelolaan dan Penambahan Koleksi Pada Museum dan Keraton	155.760.000,-	130.380.374,-	83,71

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

1. 100 = Amat Baik
2. 80 – 100 = Baik
3. 50 – 79 = Cukup
4. < 50 = Kurang

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2013.

Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2014

	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	Prosentase
1.	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	500.000.000,-	364.761.000,-	72,95
2.	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	4.500.000.000,-	4.340.396.705,-	96,45
3.	Pendukungn Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah	315.230.000,-	282.753.100,-	89,70

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d <70 : Cukup Berhasil

0 s/d <55 : Tidak Berhasil

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2014.

Jumlah Kegiatan dan Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2015

	KEGIATAN	ANGGARAN (Murni+APBDP)	REALISASI	Prosentase
1	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	2,236,340,000,-	2,138,119,100,-	100
2	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	316,720,000,-	227,537,000,-	85
3	Pendukungn Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	281,500,000,-	264,498,200,-	100

4	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	143,500,000	130,448,000	100
---	--	-------------	-------------	-----

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1.	n/a	Tidak Ada Target
2.	< 100%	Tidak Tercapai
3.	= 100%	Tercapai
4.	> 100%	Melebihi Target

Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau Tahun 2015.

Menyetujui dan mengesahkan,

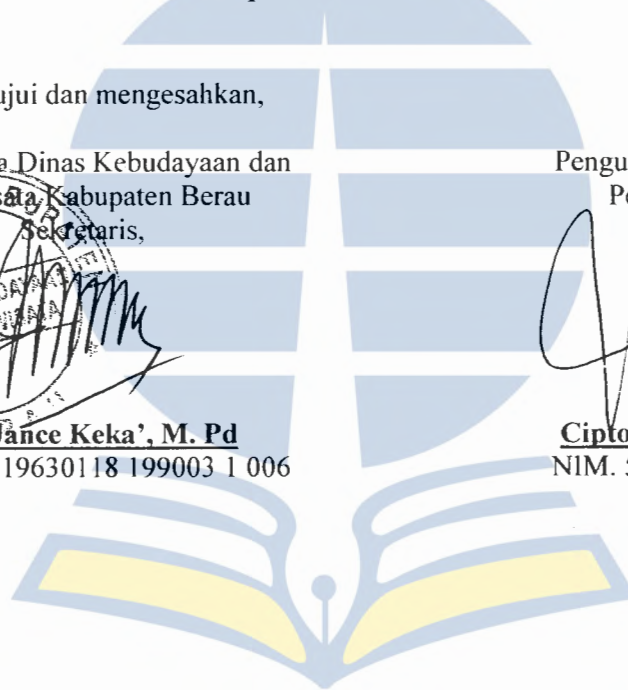
An. Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Berau
Sekretaris,



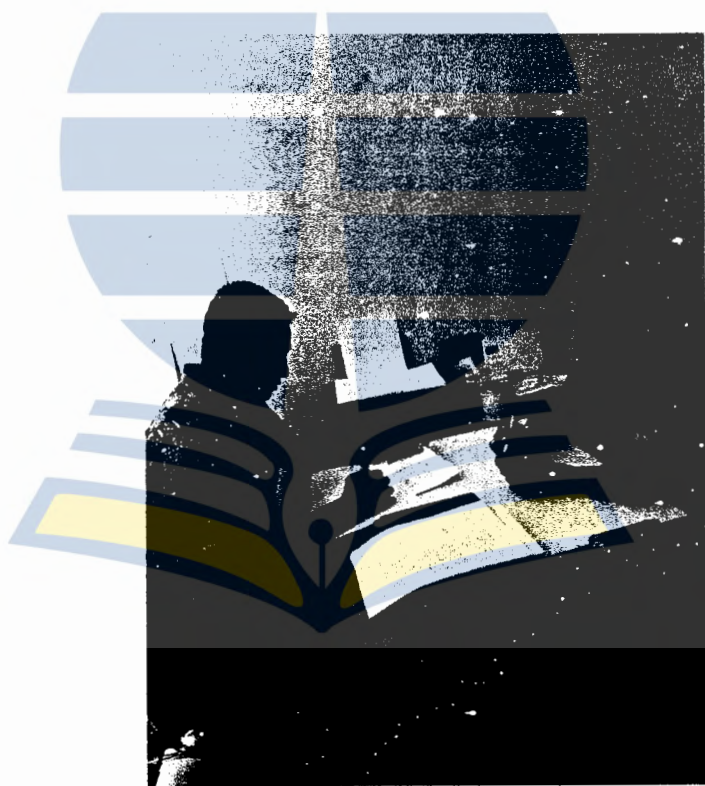
Drs. Jance Keka', M. Pd
NIP. NIP. 19630118 199003 1 006

Pengumpul data,
Peneliti

Cipto Hanjono
NIM. 500894888






DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN.








Dr. Agus Joko Purwanto


 ke saya
 12.28 Tampilkan detailnya

Pak Cipto ysh.

Sudah Ok Pak. silakan dilanjutkan prosesnya

salam

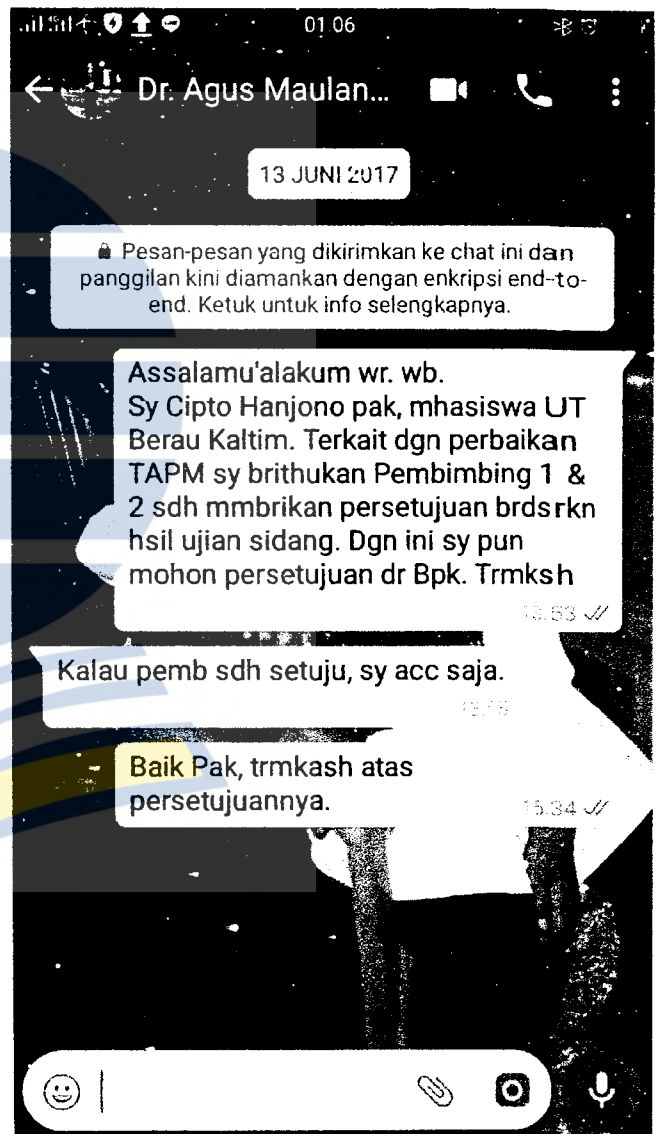
Agus Joko Purwanto

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekretaris Dewan Pengawas

*Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan*

Banten 021-7490941 (1915)





Dr. Agus Joko Purwanto

ke saya

12.28 Tampilkan detailnya

Pak Cipto ysh.

Sudah Ok Pak. silakan dilanjutkan prosesnya

salam

Agus Joko Purwanto

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekretaris Dewan Pengawas

*Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan*

Banten 021-7490941 (1915)

